PEMBUDAYAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MOMENTUM KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID 19 :Mewujudkan Perilaku Gotong-royong pada Masyarakat Bhineka

Ajar Triharso

PSP Universitas Airlangga

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan **Gotong Royong**. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong!

Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah suatu paham dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan, yang menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan Bantu-binantu bersama. Amal semua buat semua. Holobis-kontul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong-royong!

Prinsip Gotong-royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan untuk menjadi bangsa Indonesia. Inilah Saudara-saudara yang saya usulkan kepada Saudara-saudara. Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila.” (Depen-RI, 1945: 26; LPPKB, 2005: 54-55)

(Definisi Gotong-royong dalam Pidato 1 Juni 1945)

A. Pendahuluan

Pada hari Senin 14 September 2020 telah diselenggarakan webinar Kuliah Umum bagi mahasiswa baru Universitas Airlangga dengan tema: “Pentingnya Wawasan Pancasila Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa” dengan pembicara utama Dr. Yudi Latif mantan kepala UKPPIP dan atau BPIP dan rekamannya diupload di <http://youtu.be/8jTMhxfQsg>. Yudi Latif diakui secara luas sebagai pakar tentang Pancasila yang telah menulis dalam banyak buku dan artikel di media masa dan yang terakhir merupakan buku edisi komprehensif “Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan” yang menjadi fenomenal dengan konsep Civil Religion atau Agama Sipil. Dari paparan kang Yudi, demikian panggilan akrab beliau, telah memberi “siraman rohani” tentang Pancasila agar mahasiswa dalam menempuh kuliah nanti tidak hanya pintar di bidang ilmu saja namun juga mempersiapkan diri baik pribadi maupun kolektif menjadi bagian dari *social capital* (modal sosial) dalam meningkatkan daya saing bangsa di dalam pergaulan antar bangsa.

Sambutan dan himbauan Rektor Universitas Airlangga, Prof. Nasih demikian teman-teman kolega dan mahasiswa biasa memanggil, sangat relevan dengan tema webinar. Dalam membangun modal sosial, sesuai dengan dasar keilmuan beliau yaitu ilmu ekonomi yang akrab dengan masalah “modal finansial”, mengibaratkan bangsa ini sebagai sebuah pesawat, kelihatannya beliau ingin menyempurnakan teori W.W. Rostow tentang fase tinggal landas (*take off*) pembangunan ekonomi yang harus dilalui setiap negara. Pembangunan dunia di era pasca perang dingin yang cenderung dikuasai atau dihegemoni oleh narasi paham kapitalisme liberal atau neoliberal, bangsa Indonesia sejak orde baru hingga era reformasi sekarang ini sudah akrab dengan paham-paham tersebut dalam melaksanakan pembangunan. Dikatakan, dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia selama ini, ibarat sebuah pesawat, kita sudah siap tinggal landas namun belum mempunyai haluan yang jelas kemana tujuan dan bagaimana cara menghadapi “cuaca buruk” bak “badai topan” seperti pandemi covid 19 sekarang. Dengan haluan yang jelas bangsa Indonesia diharapkan akan lebih berpeluang sampai pada tujuan yang diidealkan yaitu bisa bertahan dari cuaca seburuk apapun bahkan pada momentum bencana pandemi sekarang ini insyaallah mampu meningkatkan daya saing. Beliau menilai bahwa apa yang disampaikan kang Yudi dalam webinar ini dapat menjadi rujukan untuk mencari solusi dalam meningkatkan potensi bangsa. Dengan tata nilai-nilai Pancasila sebagai titik tumpu, titik temu dan titik tuju serta menjadi bintang penuntun sekaligus “pengikat sapu lidi” pembangunan bangsa Indonesia mampu membangun modal sosial dalam rangka menghadapi globalisasi. Hingga saat ini masih terasa belum seriusnya negara dalam mensosialisasikan atau menanamkan atau membudayakan atau merevolusikan nilai-nilai Pancasila terutama dalam menghadapi kondisi kebhinekaan bangsa dan kesenjangan sosial ekonomi. Selama ini kita cenderung dalam posisi ketergantungan dengan bangsa lain dan selalu dirundung konflik baik akibat kesenjangan dan perbedaan SARA yang sangat menguras sumber daya nasional. Namun dengan keberadaan BPIP sebagai tanda keseriusan kehadiran negara menumbuhkan harapan bersama dalam membenahi tata kelola atas tata nilai Pancasila dalam rangka menciptakan tata kesejahteraan bersama yang adil dan makmur.

Dari pertanyaan mahasiswa baru yang memang rata-rata mempunyai kecerdasan lebih hasil seleksi ketat ujian masuk PTN, antara lain Satrio Pinayung dari fakultas Kedokteran Umum. Pertanyaannya: “... apa sarana penanaman sikap pancasilais yang efektif mampu menyentuh generasi muda dan untuk itu apa peranan mahasiswa dalam berlakunya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan bagaimana dengan keberadaan BPIP”. Dalam buku Wawasan Pancasila kang Yudi menyebutkan: “Pancasila sebagai filsafat negara sulit dibudayakan dalam suatu kehidupan budaya bangsa dengan basis kecerdasan yang lemah”. Sedangkan Prof. Nasih mengatakan dalam menghadapi pandemi covid 19 menganggap sebagai momentum bagi pembangunan bangsa dan menyebutkan teori fisika “suatu momentum akan sangat dipengaruhi oleh kesamaan vector”. Sedangkan kang

Yudi menceritakan penjelasan Bung Karno tentang fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa dengan teori dasar matematik “bilangan pecahan tidak akan bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan”. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi menjadi “vector” pada momentum bencana global covid 19 dan menjadi “bilangan penyebut” bagi masyarakat bhineka seperti bangsa Indonesia, tulisan berikut ini mengharapkan tinjauan dari para mahasiswa tercinta dengan tingkat kecerdasan yang sudah tidak diragukan lagi dan dosen-dosen MKWU yang idealnya menjadi anggota PSP di setiap perguruan tinggi yang sudah meyakini bahwa Pancasila adalah filsafat dan ideologi bangsa Indonesia.

B. Landasan Pemikiran

Paradigma *post modern* terutama perspektif fenomenologi hermeneutik dengan menempatkan bahasa sebagai representasi realita atau peristiwa, pidato Ir. Sukarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 adalah teks utama dan pertama hasil perjuangan para pendiri bangsa dalam rangka mencapai kemerdekaan. Teks tentang dasar negara yang disetujui oleh sidang menjadi wacana sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia merdeka. Dalam teks pidato tersebut dasar negara Indonesia disebut sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* dengan tiga nama yaitu Pancasila, Trisila dan Ekasila atau Gotong-royong. Memberi tiga nama dengan isi yang sama yaitu lima prinsip (sila) tentunya bukan tanpa tujuan karena masing-masing mempunyai makna dan konteks ruang dan waktu yang berbeda dalam realitet atau perwujudan sebagai titik tumpu, titik temu dan titik tuju serta bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kontekstualisasi ketiga nama dasar negara tersebut merupakan bagian dari misi perjuangan yang harus tercapai oleh bangsa Indonesia dan Bung Karno menyebut tujuan tersebut sebagai Trisakti. *Philosophische grondslag* dasar negara dalam kategori filsafat klasik bersifat struktural terkait dengan aspek modern dengan nilai-nilai logis rasional dan obyektif universal serta kontekstual dalam rangka memenuhi syarat berdirinya sebuah negara modern. Sedangkan kategori *weltanschauung* adalah filsafat kontemporer lebih bersifat kultural yaitu pandangan dunia suatu bangsa dalam konteks ruang dan waktu berdasarkan faktor-faktor geografis, sejarah, nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.

Pada awal berdirinya suatu negara modern *Philosophische grondslag* dan *weltanschauung* atau falsafah dan ideologi negara harus dibangun, ditumbuhkan atau dibudayakan atau “dicetak” kepada masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (*habbit*) oleh negara untuk menjadi **identitas nasional**. Setelah Pidato 1 Juni diucapkan Bung Karno dan disetujui secara aklamasi oleh sidang BPUPKI menjadi dasar pemikiran dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sesuai

dengan konteks situasi dan urgensinya, para pendiri bangsa dengan dasar pendidikan modern mereka, memilih nama pertama dasar negara yaitu Pancasila untuk segera diwacanakan, dipahami dan dijelaskan maknanya untuk “direalisasikan” dalam rangka memenuhi persyaratan keberadaan sebuah negara modern yaitu konstitusi. Dalam proses penyusunan konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) (*rechstaat*) rumusan lima sila isi dasar negara dimasukkan dalam teks Pembukaan. Setelah melewati jembatan emas kemerdekaan, selain menjalankan kehidupan negara modern berdasarkan UUD 1945, Trisila juga mulai direalisasikan baik dengan pendekatan struktural maupun kultural. Pendekatan structural, karena sebagai negara berdaulat Indonesia harus membangun norma dan perilaku sesuai dengan konvensi-konvensi internasional untuk menjadi rujukan para pemimpin bangsa bagaimana NKRI harus eksis mewujudkan identitas nasional melalui proses ratifikasi. Pendekatan kultural, karena Trisila dalam realisasinya juga harus merujuk pada nilai-nilai yang mencerminkan kondisi kebhinekaan bangsa Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional pula. Trisila harus mempunyai makna bahwa: 1. bangsa Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan (Ketuhanan Sila I), 2. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berjiwa nasionalis yang menghargai dan menghormati nasionalisme bangsa lain (Sosio nasionalisme Sila II) dan 3. Bangsa Indonesia adalah masyarakat demokratis berkeadilan (Sosio demokrasi Sila III). Jadi pelaksanaan Trisila harus selain merujuk pada nilai-nilai universal juga pada nilai-nilai sesuai dengan karakter geografis, nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal yang erat hubungannya dengan nama ketiga dasar negara Ekasila.

Ekasila kiranya paling dekat dengan *weltanschauung* atau pandangan dunia yang menunjukkan jatidiri bangsa Indonesia karena dengan nama “alias” Gotong-royong disebutkan (dalam Pidato) sebagai konsep “tulen” yang artinya ada dalam tradisi Nusantara untuk menjadi dasar karakter dan kepribadian serta jatidiri bangsa Indonesia. Jadi Ekasila bersifat kultural dan pada implementasinya mempengaruhi proses pembentukan identitas nasional dalam merealisasikan Pancasila dan Trisila sehingga satu sama lain saling melengkapi menjadikan kesempurnaan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dari perspektif fenomenologi hermeneutik konsep gotong-royong selama ini ternyata masih dipakai arti atau makna harfiahnya (semantik) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong-royong yang didefinisikan dalam Pidato 1 Juni kiranya merupakan aspek penting dari ideologi bangsa terutama terkait dengan konteks kebhinekaan bangsa Indonesia dan dalam rangka pergaulan

antar bangsa. Dari kutipan definisikan Gotong-royong dalam Pidato 1 Juni 1945 di atas menunjukkan kesadaran (**sesjarah**) para pendiri bangsa akan potensi bangsanya untuk menjadi negara hebat namun masih menghadapi masalah yang harus dipecahkan yaitu kondisi kebhinekaan masyarakat Indonesia. Yaitu membangun hubungan kekeluargaan dan prinsip-prinsip gotong-royong dalam mewujudkan kehidupan religius bersama yang harmonis sebagai suatu bangsa dalam kondisi perbedaan SARA dan kesenjangan sosial ekonomi akibat nilai-nilai negatif pandangan hidup dan prinsip-prinsip paham liberalisme dan kapitalisme dan warisan sistem penjajahan lainnya serta nilai-nilai tradisi warisan nenek moyang yang kontra produktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah merdeka.

Hubungan kekeluargaan dan prinsip-prinsip gotong-royong dari Eksila atau Gotong-royong yang dimaksud para pendiri bangsa kiranya perlu diwacanakan dan dipahami lebih lanjut maknanya pada kondisi dan situasi bangsa setelah melewati jembatan emas kemerdekaan selama 75 tahun terutama dalam menghadapi masalah lebih besar dan pelik serta tidak terduga yaitu “teror” global pandemi Covid 19. Kondisi dan situasi yang mirip perang dunia yang memporak perandakan banyak aspek kehidupan negara-negara di seluruh dunia apapun ideologinya. Kondisi dan situasi yang dapat menjadi momentum bagi bangsa yang ginus seperti bangsa Indonesia (genius Nusantara) untuk tujuan ikut menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan perspektif fenomenologi hermeneutik, dan teori-teori postmodern ternyata dalam mewujudkan dasar negara Indonesia menjadi realiteit baru memahami atau menjelaskan makna nilai-nilai modern dua nama dasar negara yaitu Pancasila dan Trisila dan selama ini pula bangsa Indonesia sangat akrab dengan nilai-nilai paham liberalisme kapitalisme dan neoliberalisme yang sudah tertanam sejak jaman penjajahan. Kutipan di atas merupakan ungkapan yang masih memerlukan penafsiran atau interpretasi lebih lanjut nama Ekasila atau gotong-royong sebagai (**nilai-nilai**) budaya dan kearifan lokal bangsa dan tentunya menjadi tugas generasi penerus apabila kita ingin menjadi bangsa Indonesia yang sempurna. “Pancasila perlu dipahami secara utuh dengan titik tolak pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 sebagai suatu strategi kebudayaan.” Tulisan ini merupakan upaya melakukan interpretasi bagian teks Pidato 1 Juni 1945 yang dikonsepsikan dalam Ekasila atau Gotong-royong.

Dalam teks Pidato 1 Juni disebutkan beberapa negara dengan pandangan dunianya masing-masing sebagai perbandingan (*comparative approach*) dimaksudkan agar kita dapat menemukan cara bagaimana jiwa kekeluargaan dan prinsip-prinsip gotong-royong harus dipahami maknanya

dan “mencetak” nilai-nilai tersebut dapat mendarah daging dalam jiwa masyarakat Indonesia dalam konteks kehidupan bersama sebagai bangsa dalam NKRI. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat sebagai bagian dari bangsa-bangsa barat dengan etika protestan (Max Weber) dengan spirit kapitalisme dan prinsip individualisme, Uni Soviet sebagai negara komunis dengan spririt sosialisme dan prinsip sama rasa – sama rata (akhirnya bubar). Jepang dan Jerman yang satu poros dengan Italia dalam Perang Dunia II (PD II) mempunyai spirit dan prinsip berdasar mitologi masing-masing. Jepang dengan etika Shintoisme berdasarkan kepercayaan mereka sebagai bangsa putra dewa (Amaterasu Omikami) dan prinsip-prinsip bushido dengan hara-kiri sebagai laku utamanya, Jerman sebagai salah satu bangsa Eropa pada jaman pemerintahan Adolf Hitler dengan etika nazi dan prinsip ras unggulnya dan Italia dengan *Holy Raman Empire* yang tentunya sudah dimodifikasi sesuai dengan konteks hubungan antara bangsa pasca PD II dan beberapa negara lainnya. Melalui perbandingan demikian tentunya tidak untuk diduplikasi namun dapat menjadi bahan refleksi bagaimana proses dan cara masing-masing bangsa “meracik” dan menanamkan nilai-nilai ideologi masing-masing ke dalam jiwa masyarakatnya. Hubungan etika kekeluargaan dan prinsip-prinsip Gotong-royong kiranya harus dipahami dan dimaknai dengan benar dengan mempelajari kekurangan dan kelebihan prinsip-prinsip individualisme, sama rasa – sama rata, bushido, ras unggul dan lain-lain dari seluruh dunia serta nilai-nilai tradisi bangsa kita sendiri. Kita harus **bangga** dengan keberadaan bangsa Indonesia dengan kegeniusan Nusantara dan tanah air bak jamrud di katulistiwa dan apa yang dikatakan Bung Karno di depan forum PBB tahun 1960 bahwa Pancasila dapat menjadi ideologi dunia. Pidato 1 Juni mengamanatkan bahwa dengan jiwa kekeluargaan dan prinsip-prinsip gotong-royong yang religious seperti yang tersurat dan tersirat dalam kutipan di atas, bangsa Indonesia yang bhineka akan menjadi hebat dan indah dengan keTunggal Ikaannya bak “tamansari” dunia. Karena dalam semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia dalam hubungan antar bangsa tidak bertujuan mengejar kepentingan kekuasaan dengan kekuatan akal dan fisik (*okol*), namun justru mengejar kepentingan untuk mencapai kebahagiaan bersama sebagai suatu bangsa dan di dunia dengan kekuatan cinta dan welas asih.

Pada simposium Pancasila di UGM tahun 2006 dinyatakan setelah reformasi telah terjadi proses “*colonization of the mind*” bangsa Indonesia oleh kebudayaan asing yang mengambil manfaat dari euforia reformasi dan membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin ”salah asuhan”. Pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa

lain. Presiden Jokowi dalam hal ini, di naskah "Revolusi Mental" mengatakan "reformasi baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional dan belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa dan cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme". Dikatakan hal tersebut tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan korektif dengan mencanangkan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Beliau mencontohkan negara yang bermental positif adalah Jepang dan Jerman.

Lebih operasional, dengan Wawasan Pancasila yang benar bagaimana bangsa Indonesia mampu menemukan cara untuk membangun modal sosial yang dapat mengeliminir efek negatif modernisasi selama ini terhadap tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera bangsa sekaligus memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi *loser* tetapi menjadi *gainer* dalam proses globalisasi.

C. Pancasila: Jawaban terhadap Krisis Ideologi Dunia

Era globalisasi adalah bagian paling akhir dari proses modernitas yang diawali dari jaman pencerahan dan *renaissance* tiga abad yang lalu di Eropa. Jaman pencerahan ditandai oleh fenomena kebebasan (*libertatem*) masyarakat Eropa dalam berfikir dari dogmatisme agama yang menjadi cikal bakal paham liberalisme dan berkembangnya prinsip moral individualis dan filsafat klasik. Filsafat kebebasan dalam bernalar mencari dan menemukan ilmu pengetahuan tentang alam melalui cara berfikir dan metoda logis dan rasional, obyektif, empiris serta bebas nilai dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Modernitas dengan paham liberalisme dan moral individualis serta perkembangan ilmu pengetahuan kemudian menjadi prakondisi perkembangan spirit/paham kapitalisme di bidang ekonomi dan spirit/paham demokrasi di bidang politik serta pembentukan negara bangsa yang satu sama lain berjaln berkelindan menjadi karakter masyarakat Eropa/barat (*western*).

Paham liberalisme di bidang ekonomi melahirkan paham kapitalisme yang berkembang dari keperluan modal (pembiayaan) pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menghasilkan penemuan-penemuan dan sistem produksi masal barang-barang dan jasa

kebutuhan manusia berbasis pabrik sebagai proses industrialisasi. Dari proses industrialisasi terjadi proses urbanisasi serta ekonomi pasar dengan prinsip persaingan bebas dan dengan semboyan “*the survival of the fittest*”. Sedangkan di bidang politik, liberalisme selain menciptakan paham demokrasi juga mendorong berkembangnya paham nasionalisme dan negara bangsa, terutama sejak perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Nasionalisme adalah paham yang berkembang di mana negara didorong menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang sentralistik dengan kekuasaan negara absolut terhadap seluruh wilayah nasional dan saat ini telah ada lebih dari 200 negara di dunia. Paham liberalisme, kapitalisme dan nasionalisme merupakan tiga serangkai paham yang menjadi mainstream tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera dengan tulang punggung negara-negara maju.

Modernitas dengan paham liberalisme, prinsip individualisme dan perkembangan ilmu pengetahuan serta paham ekonomi pasar bebas (kapitalisme liberal) serta paham politik demokrasi multi partai (demokrasi liberal) sebagai arus utama (*main stream*) yang berkembang di Eropa ternyata rentan menimbulkan kesenjangan dan penindasan antar manusia. Kesenjangan dan penindasan kemudian melahirkan pemikiran kritis yang dipelopori Karl Marx sebagai paham sosialisme-utopis revolusioner yaitu ideologi marxisme-komunisme yang bertujuan menggantikan masyarakat individualis dan sistem politik demokrasi liberal serta sistem ekonomi kapitalis liberal dengan masyarakat kolektif tanpa kelas sama rasa – sama rata, sistem politik totaliter - diktator proletar satu partai (komunis), sistem ekonomi sosialis/negara. Marxisme kemudian melahirkan konsep-konsep seperti dominasi, hegemoni, eksploitasi, emansipasi sebagai produk teori-teori kritis yang berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kepentingan oleh sebab itu ilmu pengetahuan tentangnya tidak selalu bebas nilai. Kegiatan keilmuan dalam mencari penjelasan tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat merupakan fenomena yang berbeda dengan gejala alam sebagai obyek yang tak berjiwa. Manusia baik individual maupun kelompok digerakkan oleh kepentingan yang sifatnya aktif subyektif sehingga tidak semua fenomena kehidupan manusia dapat dipahami seperti memahami gejala alam sebagai obyek pasif.

Sistem politik demokrasi multi partai dan sistem ekonomi kapitalis pasar bebas sebagai produk modernisme dalam analisis kritis marxisme, seperti telah disinggung di depan, ternyata merupakan sistem yang memproduksi kesenjangan dan perilaku eksploitatif dalam masyarakat industri, yaitu eksploitasi kaum kapitalis pemilik modal atau kaum borjuis atas kaum buruh atau kaum proletar. Perkembangan selanjutnya analisis marxisme kemudian diterapkan oleh Lenin

sebagai paham marxisme-leninisme terhadap terjadinya penjajahan atas wilayah dan masyarakat di luar Eropa sebagai perwujudan supermasi Eropa. Dari analisis kritis marxis yang determinis dan masih bersifat positif, obyektif-empiris kemudian berkembang teori-teori kritis nonmarxis. Teori-teori yang bersifat subyektif, interpretatif dan berasumsi bahwa dalam mencari penjelasan ilmu-ilmu sosial tidak cukup dengan metoda obyektif rasional. Gerakan berfikir yang diilhami oleh Karl Marx tersebut kemudian menjadi dasar filsafat kontemporer.

Dari uraian di atas yaitu sejak modernitas dimulai di Eropa muncul dua ideologi besar yang kemudian hari saling bersaing untuk mendapat pengaruh atau *sphere of influence* di Eropa dan kemudian di seluruh dunia yaitu kapitalisme-**liberalisme** dan sosialisme-**komunisme**. Dari pergolakan politik antar bangsa di Eropa kemudian munculnya ideologi berdasarkan supermasi ras unggul dan kepemimpinan Eropa yaitu **facisme**. Persingan antara Ketiga ideologi tersebut dalam kerangka supermasi Eropa ternyata menghasilkan sistem tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera dunia yang cenderung anarkhi. Ketiga ideologi tersebut satu sama lain menjadi penyebab pecahnya Perang Dunia yaitu perang antara negara-negara Eropa pada era di mana masih berlaku sistem penjajahan (paham kolonialisme) sehingga perang tersebut melibatkan seluruh dunia sehingga disebut perang dunia yaitu Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia (PD II). Perang antara negara-negara Eropa *the have* melawan *the have not* jajahan di mana wilayah dan bangsa-bangsa Asia Afrika dan Amerika Latin sebagai obyek kekuasaan bangsa-bangsa Eropa. Sebelum PD II paham atau ideologi demokrasi liberal (politik) dan kapitalisme liberal (ekonomi), telah diuraikan di muka, merupakan fenomena modern paham arus utama dalam sistem tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera negara dan dunia, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang belum sempurna dengan paradigma positivis-obyektif masih dominan, hubungan antar bangsa cenderung anarkhis sehingga proses hubungan antar bangsa merupakan perjuangan kekuasaan. Era tersebut paham nasionalisme sebagai salah satu fenomena modern juga masih berlaku di masyarakat Eropa. Era di mana dengan paradigma ilmu demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan suatu bangsa dalam memperjuangkan kepentingan untuk menguasai bangsa lain. Kondisi tersebut menambah spektrum kesenjangan dan penindasan antar umat manusia dengan penjajahan antar bangsa yaitu penjajahan bangsa-bangsa Eropa atas bangsa-bangsa di luar Eropa sebagai obyek kekuasaan. Menggunakan cara pandang fenomenologi sebagai bagian dari cara berfikir kritis dan filsafat kontemporer, modernitas menciptakan sistem tata nilai, tata kelola dan tata

sejahtera yang mendeligitimasi, mendehumanisasi dan mendepolitisasi umat manusia di seluruh dunia dan membawa masyarakat dunia mengalami dua perang besar tersebut.

Ideologi Pancasila lahir dalam situasi dan kondisi dunia demikian yaitu persaingan ideologis yang berkembang dari cara pandang modernisme yang ternyata menghasilkan sistem tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera dunia yang gagal mewujudkan semangat jaman pencerahan. Semangat di mana ilmu pengetahuan seharusnya untuk kesejahteraan dan perdamaian umat manusia justru mengalami anomali dan menimbulkan ketidakadilan yang berujung pada chaos di dunia berupa PD I dan II. Kedua perang tersebut juga merupakan perang atau persaingan ideologi antara persekutuan dua ideologi besar yang sebetulnya bertentangan secara diametral yaitu **ideologi kapitalisme-liberalisme** yang dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara dengan **ideologi sosialisme-komunisme** yang sejak 1917 menjadi ideologi negara-negara Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan poros **fasisme** dunia yaitu Jerman, Italia dan Jepang dengan kekalahan di pihak fasisme. Sementara itu di wilayah-wilayah jajahan/koloni berkembang paham nasionalisme rakyat jajahan dengan tuntutan serta perjuangan kemerdekaan menghadapi penjajahan bangsa-bangsa barat. Hal-hal tersebut telah menjadi pengalaman dan pelajaran serta bahan renungan para pendiri bangsa Indonesia dalam memperjuangkan, mempersiapkan serta mencapai kemerdekaan bangsanya pada 17 Agustus 1945 dengan falsafah dan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

D. Pancasila: Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Perang dunia memberi pengalaman traumatik dan menyadarkan masyarakat dunia untuk tidak terulang lagi peristiwa yang sangat dahsyat akibatnya pada nilai-nilai kemanusiaan. Perang akibat kesalahan tata kelola bersama kehidupan antar umat manusia dan antar bangsa. Berakhirnya PD II dengan pengalaman tersebut dan dengan semangat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dalam rangka membangun tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera dunia yang lebih tertib dan adil, dengan kembali ke semangat jaman pencerahan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan bersama umat manusia. Untuk itu maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu program PBB adalah meluruskan kembali semangat jaman pencerahan yaitu kebebasan manusia dari kungkungan terhadap hak asasi mereka antara lain menghentikan penjajahan antar bangsa dengan melakukan dekolonisasi atau memerdekakan wilayah-wilayah jajahan serta mengembangkan kerjasama antar bangsa yang

duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Sementara PBB dengan semangat demikian disibukkan dengan membangun tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera dalam hubungan antar bangsa sedangkan negara-negara bekas jajahan sibuk menata diri dengan tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera masing-masing sebagai negara baru, dunia dibuat cemas kembali. Terjadi persaingan yang bersifat “*zero sum game*” antara dua ideologi yang dipimpin dua negara yang bersekutu pada Perang Dunia II yaitu antara ideologi politik demokrasi liberal multi partai dan sistem ekonomi kapitalis liberal di bawah pimpinan Amerika Serikat atau blok (Eropa) Barat melawan ideologi politik diktator proletar satu partai dan sistem ekonomi sosialis komunis di bawah pimpinan Uni Soviet atau blok (Eropa) Timur dalam Perang Dingin. Perang yang mengedepankan persaingan pembangunan ekonomi dan penggunaan teknologi termasuk dalam persenjataan terutama senjata nuklir yang bukan hanya mengancam kehidupan umat manusia namun juga planet bumi. Perebutan pengaruh dimenangkan oleh Blok Barat dengan ideologi politik demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme pasar bebas serta nilai-nilai masyarakat individualis. Kemenangan Blok Barat tersebut oleh Francis Fukuyama disebut sebagai “kemenangan tak terbantahkan liberalisme ekonomi dan politik” dan juga sebagai “tumbuhnya ‘pembukaan pasar bersama’ hubungan internasional”. Namun era ini oleh Samuel P. Huntington dikatakan juga merupakan era yang penuh konflik-konflik lama yang tertunda berdasarkan etnis dan agama yang dikonsepsikan sebagai “benturan peradaban” atau *Clash of Civilization*.

Ramalan dan konsep tentang masa depan dunia pasca Perang Dingin dari dua tokoh intelektual yang terkenal sebagai bagian dari *think tanks* negara Amerika Serikat tersebut tentunya berpengaruh pada konstelasi politik dunia saat ini. Fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dengan China kiranya ada kesesuaian dengan pendapat Fukuyama, sedangkan tragedi Bosnia-Herzegovina, Kosovo dan di wilayah Balkan lainnya, gerakan Osama bin Laden dan peristiwa 11 September 2001 serta fenomena fundamentalisme, radikalisme dan terorisme hingga sekarang kiranya pengejawantahan konsep benturan peradaban dari Huntington. Fenomena-fenomena tersebut tentunya sedikit banyak berpengaruh pada proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang dikenal sebagai *sphere of influence* Blok Barat yaitu menjadi obyek proyek neoliberal dari ramalan Fukuyama dan dirundung konflik SARA dari ramalan Huntington. Namun

ada konsep yang mempertemukan kedua pakar yaitu tentang peran kesadaran, ide, dan ideologi dalam memotivasi dan pembentukan tindakan manusia dan bangsa-bangsa. Konsep-konsep tersebut ada dalam Pancasila yang perlu digali lebih dalam nilai-nilai moral dan etika yang masih tertanam dalam bumi dan budaya Nusantara dalam rangka mencetak karakter bangsa menghadapi paham atau ideologi liberalisme-kapitalisme yang bermetamorphosis menjadi paham neo-liberal dan paham-paham serta gerakan-gerakan radikal, fundamental berdasarkan etnis dan agama.

Pasca Perang Dingin yang menegangkan tersebut sejak awal 1990an negara-negara maju berideologi kapitalis liberal sebagai pemenang perang, sesuai ramalan Fukuyama, dengan keunggulan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di bawah pimpinan Amerika Serikat dengan narasi paham neo-liberal mendominasi kehidupan politik dan ekonomi dunia di mana bangsa Indonesia sudah menjadi bagian dari sistem dunia tersebut sejak 1965. Demikian pula tragedi Bosnia – Herzegovina dan lain-lain sebagai manifestasi benturan peradaban juga berimbas di Indonesia dengan banyak munculnya konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan sebagai gerakan radikal dan fundamental yang sangat menguras sumberdaya nasional. Dengan posisi bangsa Indonesia demikian maka cukup penting apabila generasi muda terutama mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa memahami lebih dalam tentang kondisi dunia dan bangsanya di era globalisasi ini.

E. Pancasila: Ideologi Berbangsa dan Bernegara

Ideologi terdiri dari dua kata yaitu *idea* artinya cita-cita, pikiran, keyakinan, dan *logos* artinya ilmu atau kebenaran. Jadi ideologi ialah ilmu tentang keyakinan, atau cita-cita berdasar keyakinan, atau keyakinan tentang kebenaran, atau pikiran yang diyakini benar. Karena yang memiliki keyakinan itu adalah masyarakat tertentu, maka ideologi merupakan ilmu keyakinan dari masyarakat tertentu. Ideologi berbeda dengan ilmu dan filsafat karena ideologi adalah milik suatu masyarakat atau suatu bangsa dan ideologi harus memihak kepada masyarakat tersebut untuk memperjuangkan kepentingannya. Konsep ideologi pertama kali dibahas oleh Destutt de Tracy seorang filsuf Perancis. Dikatakan ideologi ialah analisis sistematis tentang ide dan sensasi, dan maknanya. Manusia atau masyarakat tidak dapat mengetahui benda-benda dalam dirinya, tetapi melalui ide-ide yang terbentuk melalui sensasi manusia terhadap benda-benda tersebut. Jika akan menganalisis ide dan sensasi secara sistematis, maka harus memiliki latar belakang seluruh pengetahuan ilmiah yang kuat untuk dapat menarik kesimpulan secara lebih praktis. Melalui analisis yang cermat terhadap ide dan sensasi, ideologi memungkinkan dunia manusia dapat dipahami, dan karena itu memungkinkan tatanan

sosial dan politik diatur berdasarkan kebutuhan dan aspirasi manusia. Ideologi akan menempatkan moral dan ilmu pada sebuah fondasi yang kokoh dan menyelamatkan mereka dari kesalahan dan prasangka.

Ideologi sama dengan "isme" atau paham yang harus diperjuangkan yang mempunyai sisi negatif dan positif. Negatif apabila isme itu dipandang dari sudut isme lain, dan positif apabila isme itu dipandang dari sudut keyakinan penganutnya. Ideologi merupakan sistem pemikiran, sistem keyakinan, sistem simbol yang lahir dari sistem sosial. Itu artinya bahwa ideologi berevolusi menurut evolusi sosial. Ia merupakan bangunan atas dari kondisi nyata kehidupan ekonomi. Ideologi dapat diwariskan oleh generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Karena masyarakat atau bangsa yang berideologi adalah bangsa perjuangan, dan menurut Destutt de Tracy suatu masyarakat atau bangsa harus memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah yang kuat untuk dapat menarik kesimpulan secara lebih praktis sebagai ideologi baik modern maupun kritis khususnya dunia pendidikan layak untuk melanjutkan dan memfasilitasinya.

Para pendiri bangsa Indonesia adalah tokoh-tokoh berpendidikan modern yang berfikir kritis terhadap kolonialisme. Kontradiksi sosial yang diciptakan kolonialisme merupakan mata pelajaran pokok yang terus-menerus dikaji untuk menentukan aksi dan revolusi yaitu melakukan revolusi dari masyarakat yang terbelenggu menjadi masyarakat merdeka dan tentunya harus diteruskan oleh generasi muda. Ideologi harus menjadi alat pembebasan manusia dari kekuasaan yang mengekang kebebasan masyarakat untuk bernalar. Ideologi sebagai senjata moral untuk melawan penindasan dan harus dipahami sebagai gerakan kemanusiaan dan intelektual dan Pancasila termasuk dalam kriteria demikian. Menurut Alfian ideologi adalah sebagai suatu pandangan atau sistem nilai menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi. Ideologi adalah juga suatu pernyataan dari nilai-nilai dasar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sebagai suatu kerangka cita-cita yang dipakai sebagai dasar bagi suatu sistem sosial atau "*way of life*" yang dicita-citakan. Suatu ideologi dihubungkan dengan semacam sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial serta tujuan-tujuan masyarakat. Sebagai suatu dasar sistem kepercayaan, suatu ideologi tidak hanya berhubungan dengan satu nilai-nilai pokok kehidupan masyarakat, tetapi ideologi itu sendiri mempunyai nilai lebih tinggi untuk dipertahankan dan dalam banyak hal berdiri di atas nilai-nilai pokok di atas.

Suatu keistimewaan dari ideologi, keyakinan yang ada dalam ideologi biasanya berhubungan erat

dengan kepercayaan, agama atau "nationalistic sentiment", di mana masing-masing dapat saling melengkapi. Dalam proses hubungan antar bangsa ideologi merupakan salah satu elemen kekuatan nasional penting bagi setiap negara dalam perjuangan kekuasaan (struggle for power). Karena ideologi suatu negara dapat menjadikan negara tersebut sebagai gainer ataupun loser dalam persaingan dunia yang sifatnya cenderung anarki. Dengan latar belakang yang berbeda baik secara kultural, historis maupun natural hal tersebut tergantung pada kreatifitas dan kecerdasan dari setiap bangsa dalam membentuk atau membangun "narasi alternatif tentang globalisasi" menghadapi proyek-proyek neoliberal dan radikal dengan ideologi masing-masing. Pancasila kiranya merupakan ideologi hasil pemikiran yang matang dari para pendiri bangsa Indonesia sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan (kenegaraan) ketika itu yang mampu membuat refleksi sekaligus interpretasi ke masa depan dalam Pidato 1 Juni 1945 sesuai dengan konteks kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang berdaulat.

F. Pancasila: Penguatan Ideologi dan Peranan PT

Dengan pemahaman tentang ideologi demikian, betapa pentingnya peranan kaum intelektual dan PT. Sampai dengan era reformasi saat ini di mana bangsa kita mengalami situasi krisis dan dapat sampai pada stadium kritis yaitu tingkat krisis motivasi yang mampu menciptakan situasi revolusioner dan mengancam eksistensi ideologi Pancasila apabila tidak ada upaya serius untuk menyelamatkannya. Pada waktu yang lalu salah satu yang mengancam keberadaan Pancasila adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Simposium memperingati hari lahirnya Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada – Lemhanas – LIPI - KAGAMA 14-15 Agustus 2006 disebutkan: "Keberadaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sudah tidak mewajibkan lagi Pendidikan Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari proses "*colonization of the mind*" bangsa Indonesia oleh kebudayaan asing yang mengambil manfaat dari euforia reformasi dan membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin "salah asuhan". Pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa lain. Setelah dilakukan diskusi selama dua hari, simposium kemudian menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena keberhasilan penetrasi global neoliberal dan paham radikal yang semakin gencar khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin. Oleh sebab itu, peserta sepakat untuk dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila". Sekarang justru perilaku liberal sekaligus radikal sangat nyata semakin merasuki jiwa masyarakat Indonesia dan banyak kaum terpelajar masuk dalam arus

negatif tersebut. Oleh sebab itu ideologi Pancasila harus segera direjuvenasi, diselamatkan sekaligus direvitalisasi dan diimplementasikan sebagai proses pemberdayaan.

Dengan pendekatan analisis budaya dalam memahami pembentukan ideologi setiap negara, seperti telah disinggung di depan, harus melalui suatu proses pembentukan ide-ide dan nilai-nilai. Di negara-negara bekas jajahan seperti halnya Indonesia yang mempunyai warisan jaman kolonial proses tersebut dapat dipercepat dengan menekan elemen-elemen pikiran-pikiran rasional ilmiah sekaligus kritis dari barat (*western*) dengan memupuk kedewasaan ontologi. Ideologi rasional ilmiah dengan bias barat baik dari jaman penjajahan maupun era perang dingin dan setelahnya atau era reformasi sekarang bagi bangsa Indonesia harus dihadapi secara kritis dengan subkultur setempat, tradisi kebudayaan besar masyarakat jajahan sebagai unsur pemersatu yang paling efektif dalam kebudayaan yang mempunyai kemampuan untuk menyatukan semua pihak yang dapat menyesuaikan diri dengan bahasa, dokumen dan sejarah suatu bangsa. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang dikatakan Destutt de Tracy, sangat terkait dengan keberadaan kaum intelektual yang mempunyai peranan penting di dalam transformasi lembaga-lembaga dan ideologi politik formal dari Barat dengan kecerdasan politik mereka untuk dapat diterapkan sesuai dengan kepentingan obyektif untuk negara mereka. Artinya dalam membangun negara modern tentunya harus pandai-pandai memilah dan memilih tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera baik nilai-nilai modern maupun nilai-nilai tradisional sehingga mampu hidup sebagai bangsa berjatidiri berdampingan dengan bangsa-lain di seluruh dunia. Ideologi Pancasila kiranya dibangun dengan proses demikian sebagai hasil kecerdasan kolektif para pendiri bangsa.

Ideologi Pancasila, dalam cara pandang fenomenologi lahir dari proses intersubjektif para pendiri bangsa sebagai subyek-subyek pejuang kemerdekaan terutama para anggota BPUPKI di mana Bung Karno adalah ego transendentalnya yang tertuang dalam Pidato 1 Juni 1945 dengan tiga nama yaitu Pancasila, Trisila dan Ekasila atau Gotong-royong. Ideologi Pancasila lahir dari proses demikian dan ternyata sekarang menghadapi pergeseran nilai dan kehilangan élan vitalnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pegeseran nilai-nilai akibat interaksi lebih lanjut dalam proses globalisasi dan untuk menemukan kembali nilai-nilai mutakhir dari ideologi Pancasila maka kaum intelektual dan dunia PT kembali dihadapkan pada tanggung jawabnya untuk merevitalisasi dengan "sub-kultur kebudayaan besar masyarakat" Indonesia agar mampu menjadi perekat pluralitas masyarakat yang bertambah kompleks akibat pembangunan dan

globalisasi sekarang ini. Pergeseran nilai tersebut sebagai westernisasi sebagai proses merasuknya nilai-nilai tradisi barat ke dalam tata nilai bangsa-bangsa sejak jaman pejajahan serta radikalisme dan fundamentalisme etnis dan agama.

Dari sudut pandang studi ideologi, **sistem tata nilai** suatu masyarakat dianggap sebagai unsur yang paling penting. Dalam beberapa hal, sistem nilai adalah ideologi. Untuk dapat memahami ideologi suatu negara, khususnya sistem nilainya, kita harus memahami dasar teoritis dan filosofisnya. Dengan begitu, banyak analisis ideologi perlu di diberikan dalam suatu uraian bentuk pertanyaan yang biasanya dianggap sebagai falsafah politik. Karena secara bebas, tujuan-tujuan filosofis politik adalah pemahaman nilai-nilai politik dan norma-norma politik. Ideologi politik merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Di samping itu, akan berusaha dikaji ide tertentu tentang sikap-sikap terhadap berbagai lembaga dan proses masyarakat yang terdapat dalam ideologi. Kita dapat menyimak rangkaian masalah apa yang penting bagi setiap ideologi, dan selanjutnya kita dapat menentukan dasar tertentu untuk saling membandingkannya.

Sebelum ini dapat dilakukan, dengan memakai parameter Lyman Tower Sargent kita perlu memahami tentang setiap lembaga yang terkait dengan **tata kelola** proses ini. Sistem sosialisasi merupakan bagian terpenting dalam masyarakat. Proses tersebut memungkinkan individu mendapatkan nilai-nilai dari masyarakat sebagai milik mereka sendiri. Sering dianggap bahwa lembaga-lembaga terpenting yang mempengaruhi cara-cara dan tingkat dengan mana para individu mendapatkan nilai-nilai ini adalah 1. sistem keluarga, 2. sistem pendidikan, 3. sistem agama, dan 4. berbagai pengaruh lain seperti media masa, kelompok-kelompok sebaya, dan sebagainya. Kita tidak selalu yakin tentang mekanisme dengan mana berbagai lembaga sosialisasi beroperasi. Harus pula diakui bahwa pandangan seorang anak tentang dunia secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan paling tidak oleh tahun-tahun awal sekolahnya. Barangkali kurang jelas bagaimana lembaga-lembaga sosialisasi lainnya mempengaruhi pandangan seorang individu tentang kehidupan. Barangkali kita bisa menganggap bahwa pesan yang sama yang diulang-ulang dalam lembaga-lembaga yang mengajarkan individu untuk menghormati, seperti sistem-sistem agama dan pendidikan, bisa melahirkan akibat yang kumulatif dan akhirnya menjadi bagian dari sistem nilai individu. Barangkali media massa bekerja dengan cara yang sama. Jadi sesuai dengan sistem sosialisasi yang dipilih dan dianggap sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia adalah sistem

pendidikan umum (*public school*). Sosialisasi implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pendidikan umum yang target utamanya adalah generasi muda baik murid (sekolah menengah) maupun mahasiswa (PT) dan metode implementasinya terstruktur dalam kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar maka proses sosialisasi yang lebih luas yaitu ke masyarakat akan menjadi efektif. Artinya proses sosialisasi dalam sistem masyarakat yang akan diuraikan sebagai bagian dari benang merah pendidikan ideologi yang terintegrasi. Sehingga sistem politik dapat membuat keputusan-keputusan yang membatasi keseluruhan masyarakat, dan selanjutnya sistem ini memegang kunci bagi setiap pemahaman terhadap sistem sosial dan ideologi secara menyeluruh.

Untuk itulah pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon intelektual pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara seperti disebutkan dalam Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila. Disebutkan: "... mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. ...diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitas sesuai dengan bidang studi masing-masing." Sedangkan salah satu tujuan mahasiswa mempelajari ideologi: "... menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia; menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila."

Dalam konteks sistem seperti yang telah diuraikan dan dalam rangka memberi masukan pada pelaksanaan Revolusi mental Presiden Jokowi perlu dicoba memahami dasar teoritis dan filosofisnya dan format pendidikan yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat agar perilaku Pancasilais dapat mendarah daging di masyarakat.

G. Pancasila: Globalisasi dan Proyek Neoliberal

Bagi bangsa Indonesia, salah satu masalah penting pada proses pembangunan nasional di era globalisasi dengan prinsip keterbukaan dan terintegrasi dalam sistem kapitalisme dan liberalisme yang sekarang telah bermetamorfosis menjadi paham neoliberal adalah bahwa pada tingkat praksis, seperti kesimpulan dari simposium yang diselenggarakan di UGM, telah terjadi fenomena perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadi bias nilai-nilai asing yang menyertai proses pembangunan dan modernisasi.

Oleh sebab itu, bangsa Indonesia memerlukan upaya untuk mengembalikan arah pembangunan pada tatanan dan fondasi nilai-nilai moral dari sub-kultur kebudayaan besar masyarakat yang telah dengan tulus dan susah payah disusun konsep dasarnya oleh para *founding fathers* bangsa, yaitu filsafat dan ideologi nasional Pancasila.

Kesadaran tersebut tercermim dalam tulisan Presiden Jokowi di harian Kompas 10 Mei 2014 ketika masa kampanye kepresidenan yang pertama dengan judul "Revolusi Mental" yang mengatakan:

"Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru ... tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa. ... Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif ... dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan."

Suatu kesadaran bahwa selama ini implementasi nilai-nilai Pancasila ternyata masih dalam rangka terbangunnya tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera dalam struktur dan fungsi negara Indonesia modern yang bersifat *tangible (fisical)* termasuk amandemen UUD 1945 seperti dikatakan Yudi Latif telah paripurna. Namun apa yang dimaksud revolusi mental Presiden Jokowi tentunya terkait dengan sub-kultur kebudayaan besar masyarakat sehingga perlunya menggali lebih dalam lagi aspek budaya atau "karakter asal yang mengendap laten dalam jiwa penduduk" yang bersifat *intangible (moral/etika)* dari mana nilai-nilai dasar kepribadian dan karakter bangsa dibangun. Nilai-nilai "tulen" atau asli dari khasanah budaya bangsa termasuk praktek keteladanan hidup dari nenek moyang dan para *founding fathers*.

Pada awal 1990an era Perang Dingin berakhir dengan kemenangan Blok Barat dengan ramalan dan konsep tentang masa depan dunia pasca Perang Dingin dari dua tokoh intelektual yang telah diuraikan di depan yaitu Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington yang terkenal sebagai bagian dari *think tanks* negara Amerika Serikat, sedikit banyak tentunya berpengaruh pada proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia sebagai *sphere of influence* Blok Barat. Disebutkan ada konsep yang mempertemukan kedua pakar yaitu tentang peran kesadaran, ide, dan ideologi dalam memotivasi dan pembentukan tindakan manusia dan bangsa-bangsa.

Dalam peta polarisasi teori dan metodologi ilmu pengetahuan pada kajian ilmu sosial kedua ilmuwan Amerika Serikat tersebut termasuk penganut filsafat klasik yang positivis-behavioralis, obyektif, dan modernis serta metode empiris, matematis dengan teori-teori psikologi-sosiologi dan tentunya pendukung paham neoliberal. Yaitu bagaimana agar Amerika Serikat tetap memegang kendali dan dominasi serta hegemoni tidak hanya atas negara-negara berkembang tetapi secara global dalam rangka menjalankan “proyek neoliberal”. Untuk itu, walaupun permasalahannya sama yaitu menghadapi globalisasi, dengan pentingnya peran kesadaran, ide, dan ideologi dalam memotivasi dan pembentukan tindakan manusia untuk mengimbangi paham neoliberal, dasar kajian tulisan ini menempatkan diri pada posisi yang berseberangan, yaitu pada kubu filsafat politik kontemporer, kritis, normatif-preskriptif, subyektif, dan posmodernis serta metode fenomenologi dan hermeneutik dengan memakai teori-teori budaya antropologi budaya. Dengan teori budaya, pengkajian memberi tempat bagi manusia untuk bertindak atas kehendak (preferensi) dan pilihan bebas dan tidak dalam kehampaan sosial (voluntaristik) dengan memberi penjelasan *social cultural*.

Bertolak dari pemahaman demikian, dalam rangka apa yang Yudi Latif sebut sebagai usaha “memperkuat karakter keindonesiaan” bangsa Indonesia harus membangun pemikiran agar tidak hanya menjadi obyek proyek neoliberal yang menciptakan ketimpangan terutama dalam aspek **kesejahteraan**, namun memberdayakan diri menjadi subyek yang partisipatif dan emansipatif sekaligus kreatif mampu bertahan dalam menghadapi fenomena globalisasi dengan paham neoliberal sebagai *main stream* dan benturan peradaban terutama antara peradaban Islam/Timur Tengah dan peradaban Kristen/Barat. Bangsa Indonesia harus mampu menyusun strategi bagaimana menjadi subyek yang mempunyai kesadaran tentang jati diri sebagai modal sosial (*social capital*) dengan menawarkan kerangka kepandaian sebagai “proyek kritis-posmodernis” dalam membangun “narasi alternatif tentang globalisasi” yang mempunyai akar histories. Lebih operasional lagi, bagaimana bangsa Indonesia mampu menemukan cara untuk membangun modal sosial yang dapat mengeliminir efek negatif terhadap tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera negara modern dari prinsip keterbukaan selama ini sekaligus membangun kebersamaan yang religious dalam memaksimalkan potensi bangsa untuk tidak menjadi *loser* tetapi menjadi *gainer* dalam proses globalisasi.

H. Pancasila: Kebijakan Presiden Jokowi

Pada 27 Juni 2019 Presiden Jokowi sebagai presiden pertahana telah disahkan oleh keputusan MK menjadi presiden terpilih kembali dalam Pemilu 17 April 2019. Ada beberapa issue kebijakan yang terkait dengan Pancasila dan pembangunan atau menurut Yudi Latif sebagai proses pencetakan karakter bangsa yang sudah dirintis dan diinisiasi oleh beliau pada masa kepresidenan 2014-2019. Seperti telah disinggung di depan, Revolusi mental yang dicanangkan 10 Mei 2014 di harian Kompas sebelum terpilih menjadi presiden kiranya menjadi visi dan misi pembangunan yang ditawarkan dalam masa kampanye pemilihan presiden. Dari kutipan teks Revolusi Mental di atas dikatakan reformasi baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya fisik dan institusional negara (*state building*) dan sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif terhadap pengaruh paham liberalisme terutama nilai-nilai individualisme barat.

Pada masa kepresidenan pertama Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dengan Keputusan Presiden No. 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016. Pada 19 Mei 2017 ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) dan pada 28 Februari 2018 ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pengganti UKPPIP. Keputusan-keputusan tersebut kiranya merupakan rangkaian kebijakan sebagai bagian dari misi presiden dalam rangka merealisasikan revolusi mental dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang selama ini terpaku pada 18 Agustus 1945.

Dengan penetapan 1 Juni sebagai hari besar nasional kiranya perlu dipahami bahwa beliau ingin menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Seperti telah disinggung di depan, tulisan ini menawarkan kajian akademis dengan memakai cara pandang atau cara berfikir fenomenologi dan metoda pemahaman hermeneutik dan filsafat kontemporer tentang Pancasila untuk melengkapi cara pandang modernisme dan filsafat klasik yang selama ini dominan baik di dunia akademik maupun politik. Terutama terkait dengan nilai-nilai kritis Pancasila yang menyadari bahwa selama ini kita terhegemoni oleh kepentingan-kepentingan bangsa lain terutama yang berpaham neoliberal atau pemboncengnya dengan harapan dapat menjadi masukan (*feed back*) pada kebijakan pemerintah selanjutnya. Apa yang telah dibahas tentang Pancasila oleh Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna, tulisan ini ingin menyempurnakan proses revolusi

kemerdekaan dengan sumbangan pemikiran pada proses revolusi mental dengan tema Negara Sempurna.

I. Pancasila: Membaca Ulang Pidato 1 Juni 1945

Dalam cara pandang fenomenologi sebagai kritik terhadap cara pandang modernisme dan hermeneutik sebagai metode memahami kehidupan manusia kiranya ada kesejajaran antara Revolusi Mental Ir. Joko Widodo di harian Kompas dengan Pidato 1 Juni 1945 Ir. Sukarno di Sidang BPUPKI. Keduanya diwacanakan sebelum beliau berdua yaitu pak Jokowi dan Bung Karno menduduki jabatan presiden dan keduanya terkait dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pidato 1 Juni adalah teks visi dan misi Bung Karno sebagai subyek pejuang kemerdekaan, adalah rumusan atau hasil penggalian dari khasanah budaya nenek moyang yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila. Bung Karno juga sekaligus ketua Panitia 9 yang bertugas menginterpretasi isi Pidato 1 Juni yang beliau ucapkan sendiri sebagai ego transendental (fenomenologi) tentang makna Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* bangsa dan negara Indonesia yang akan dimerdekakan. Panitia menghasilkan rancangan konstitusi negara berdasarkan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* yang kemudian disyahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai UUD 1945 dan dengan berdasarkan UUD 1945 kemudian Bung Karno menjadi presiden I Republik Indonesia. Tentang konsep Trisila dengan konsep Trisakti yang dilontarkan Bung Karno menjelang berakhirnya pengabdianya sebagai pemimpin bangsa dengan ungkapan “berdaulat di bidang politik, berkari di bidang ekonomi dan berkepribadian berdasar budaya sendiri” dan Jasmerah “jangan sesekali melupakan sejarah” seolah memberi kata kunci apa yang harus di kerjakan oleh penerusnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut terutama sebagai *weltanschauung*. Tentang hal tersebut perlu disimak apa yang diingatkan oleh Prof. Hariyono :

“Pancasila cita-cita bangsa Indonesia, karena itu, bukan hanya sebagai jejak dan saksi masa lalu tetapi juga harapan di masa depan. Pancasila tidak bisa direduksi perannya hanya sebagai pedoman tingkah laku individu, tetapi lebih dari itu, menjadi etika-publik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pancasila pada urutannya tidak bersemayam pada pualam masa silam yang beku, tetapi sebagai bintang penuntun yang melesat dinamis seiring dengan gerak evolusioner pemikiran manusia.”

Kedua, Revolusi Mental adalah Teks berisi visi (horizon) dan misi presiden Jokowi sebagai generasi penerus dalam rangka menyempurnakan dengan pemaknaan atau interpretasi lebih lanjut

Pidato 1 Juni dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup bangsa. Melalui penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila menjadi langkah awal dalam rangka tugas estafet tersebut. Naskah atau teks Revolusi Mental merupakan wacana yang ditulis oleh presiden Jokowi dalam rangka membangun mental bangsa karena implementasi nilai-nilai Pancasila dirasakan belum maksimal terutama dalam mengejawantahkan Trisakti dalam pembangunan bangsa dan negara sampai dengan era reformasi sekarang. Tulisan ini bertujuan mengajukan cara pandang dan filosofi yang diharapkan dapat menguraikan kemandekan (*jumud*) dalam usaha pembangunan karakter bangsa dengan **pembudayaan** nilai-nilai Pancasila.

Dalam Pidato 1 Juni ketika membahas tentang konsep bangsa Bung Karno merujuk pada pemikiran dua ilmuwan dari dua negara Eropa kontinental yaitu Otto Bauer dari Jerman dan Ernest Renan dari Perancis. Untuk itu tulisan ini memakai cara pandang fenomenologi-hermeneutik dan filsafat kontemporer postmodernis dengan teori-teori kritis-normatif yang berkembang dengan pesat setelah PD II yang tokoh-tokohnya banyak berasal dari kedua negara kontinental tersebut. Seperti diketahui di kalangan akademis Indonesia ada dua cara berfikir tentang negara yang berkembang di Eropa atau barat yaitu aliran kontinental dan nonkontinental. Selama ini kita masih terfokus pada cara pandang dan cara berfikir akademis warisan era kolonial melalui para pelajar seperti Bung Karno dan Bung Hatta yaitu cara pandang modernis dan filsafat klasik dengan teori-teori behavioris-positifis-legalistik. Cara pandang modernisme menjadi dominan seiring dengan perkembangan IPTEK pasca PD II yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat dan negara-negara nonkontinental lainnya yang diakselerasi oleh perkembangan ekonomi dan persaingan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur. Bangsa Indonesia melalui para pelajarnya tidak lepas dari cara berfikir demikian dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan negara Indonesia modern. Bahkan cara berfikir modernisme semakin intensif merasuk dalam jiwa bangsa Indonesia sejak 1965 dengan masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB dan melakukan kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara Blok Barat alih-alih kerjasama dengan negara-negara Blok Timur yang mengkhianati ketulusan bangsa Indonesia dalam persahabatan dengan dukungannya terhadap G-30-S PKI.

Dengan cara pandang fenomenologi dan filsafat kontemporer sidang BPUPKI seperti telah disinggung di muka, dipahami merupakan proses *intersubjective* para *founding fathers* atau bapak

pendiri bangsa sebagai subyek-subyek pejuang kemerdekaan dalam merumuskan dasar negara di mana Bung Karno menjadi *ego transcendental* secara epistemologi-Husserl atau penggalinya secara ontologis-Heidegger yang terurai dalam Pidato 1 Juni 1945. Dalam analisis fenomenologi-hermeneutik Ricouer, pidato tentang dasar negara tersebut dengan visi/horizon penulis yang sama dengan Bung Karno adalah teks di mana di dalam memahami arti dan maknanya dengan pendekatan cara baca dekonstruksi-Derrida, seperti halnya memahami *Magna Charta* untuk Inggris, *Declaration of Independence* untuk Amerika Serikat, *Manifesto Komunis* untuk negara-negara komunis, teks Pidato mempunyai oposisi biner **modernitas** dan **tradisi**. Oleh sebab itu dalam memahami arti dan makna Teks Pidato 1 Juni harus dipelajari baik dalam mencari penjelasan tentang **aspek modern** maupun penafsiran atau interpretasi tentang **aspek tradisi** untuk diiluminasi dalam rangka mengimplementasikan dan mewujudkan bangunan bangsa dan negara Indonesia lebih sempurna.

Keberadaan bangsa dan negara Indonesia sejak 1945 adalah bagian dari revolusi dunia pasca Perang Dunia II di mana sudah tidak ada sistem penjajahan (kolonialisme) dan harus dilaksanakan dekolonisasi (Charter PBB). Bangsa Indonesia ditakdirkan (*da sein* – Heidegger) sebagai bangsa terjajah dan harus – dilakukan oleh para bapak pendiri bangsa sebagai pejuang kemerdekaan - mampu memahami dirinya dan situasi keberadaannya serta menegaskan jati diri (eksistensinya) sebagai subyek otonom di dunia yang revolusioner tersebut dan itu semua tertuang dalam Pidato 1 Juni 1945. Situasi revolusioner pasca PD II, seperti diuraikan di atas, diwarnai era perang dingin dan kemudian dilanjutkan dominasi paham neoliberal dan benturan peradaban yang erat hubungannya dengan proyek neoliberal di satu pihak serta radikalisme dan fundamentalisme di pihak lain dan apabila tidak diwaspadai dan dihadapi dengan cerdas dan waspada akan membawa masalah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan latar belakang cara pandang demikian visi dan misi revolusi bangsa dan negara Indonesia sejak 1945 adalah menghadapi dunia baru dengan tata kelola di bawah PBB yang ternyata tidak sepenuhnya mampu mengendalikan proses perjuangan kekuasaan (*struggle for power*) para anggotanya. Walaupun demikian bangsa Indonesia dengan ketajaman Pancasila sebagai hasil pemikiran kritis menunjukkan kekuatannya sebagai ideologi antara lain dengan diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung menjadi pelopor gerakan Non Blok yang sangat berpengaruh di PBB dalam mengendalikan perang dingin dengan membentuk Kelompok 77.

Setelah kekalahan blok sosialis-komunis, sejak 1990an seperti telah diuraikan, selain dunia didominasi paham liberalisme dan kapitalisme atau paham neoliberal sebagai pemenang perang termasuk dalam tata kelola dunia di PBB, dan seperti diramalkan Huntington, juga diiring bangkitnya radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, primordeialisme dan terorisme. Situasi dunia tersebut merupakan tantangan bagi perkembangan keberadaan Pancasila dan peradaban bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan konstitusi hasil kerja Panitia 9 yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 beserta amandemennya (hasil reformasi 1998) di mana sila-sila Pancasila dan visi dan misi negara dimuat dalam Preambulnya “menjadi penuntun dan memberi orientasi dan cita-cita bangsa ke depan” sebagai *leitstar dinamis*, para bapak pendiri bangsa telah melakukan langkah-langkah dalam konteks mewujudkan bangsa dan negara Indonesia merdeka dengan membangun struktur dan infrastruktur negara modern. Pembangunan negara dan bangsa yang dipimpin oleh para “Satrio Piningit” bangsa Indonesia yaitu Bung Karno, Pak Harto, Prof. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dengan segala kelemahannya sebagai manusia dan dengan mengikuti perkembangan dunia pasca perang Dunia II termasuk perkembangan IPTEK melalui pendidikan tinggi (PT), dan sejak pemerintahan Pak Harto, seperti telah diuraikan, semakin akrab dengan negara-negara berpaham kapitalisme liberal melalui bantuan pembangunan, sekarang telah mencapai tahapan paripurna (Yudi Latif).

Seperti tersurat dan tersirat dalam teks Revolusi Mental presiden Jokowi, pembangunan kita masih memfokuskan aspek-aspek institusional fisik-material – **membangun badan** - sebagai proses *state building* dalam konteks mewujudkan negara modern dengan cara pandang modernisme dan filsafat klasik yang logis-rasional dengan infrastruktur keras atau fisiknya. Permasalahan sekarang adalah bagaimana mencenerabut akar-akar nilai-nilai negatif liberalisme yang sudah tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia sampai pada tahap yang memerlukan cara pandang yang melampauinya untuk menyempurnakan pembangunan pada aspek rohaniah-mental - **membangun jiwa** - sebagai proses *nation building* dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dengan infrastruktur lunak atau jiwa. Pembangunan dalam rangka menghadapi masalah kesatuan dan persatuan bangsa terutama membangun karakter atau kepribadian bangsa yang terkait dengan heterogenitas aspek tradisi dan agama. Oleh sebab itu dari tradisi dan agama harus digali lebih dalam nilai-nilai moral dan etis sebagai bagian penting dari jatidiri/eksistensi bangsa dan

negara Indonesia, “menjadi titik temu yang menyatukan dan alat pemersatu sebagai *meja statis*. Satu sama lain yaitu pembangunan badan dan pembangunan jiwa adalah “sebagai suatu misi dan masa depan bangsa yang harus diperjuangkan terus menerus dalam ruang keindonesiaan.

Dalam rangka menggali lebih dalam aspek tradisi dan agama untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara Indonesia itulah kita perlu membaca ulang teks Pidato 1 Juni dengan cara pandang fenomenologi dan metode hermeneutik dari filsafat kontemporer. Dalam memahami Teks Pidato 1 Juni selama ini berdasarkan kriteria Derida dalam teori dekonstruksi dengan oposisi biner yang telah disebutkan di mana aspek tradisi merupakan konsep yang ditunda atau ditangguhkan atau *defferance* penafsiran maknanya (oleh para pendiri bangsa) karena menunggu konteks yang sesuai (*appropriate*). Masalah yang disebabkan oleh kondisi kebhinekaan dan kesenjangan masyarakat di Indonesia yang di ciptakan oleh narasi paham kapitalisme dan liberalisme pada masyarakat industrial sejak jaman penjajahan (kolonial) yang sudah mendapatkan perhatian sejak Karl Marx dengan analisis dua kelasnya dalam menciptakan paham komunisme. Paham dengan “virus” formalisme dan egoisme keagamaan yang di Indonesia mendangkalkan semangat keberagaman sebagai landasan etika dan etos hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara serta melumpuhkan kemanusiaan dengan nilai-nilai individualisme, materialisme dan hedonisme yang mengancam kerukunan dalam bermasyarakat. Sebetulnya sudah disadari oleh para pendiri bangsa dan menjadi bagian dari Pidato 1 Juni terutama dalam konsep Gotong-royong.

Seperti disebut dalam Pidato 1 Juni nama lain Pancasila adalah Trisila dan Ekasila atau Gotong-royong. Dengan cara pandang dan analisis fenomenologi-hermeneutik sejak proklamasi kemerdekaan konsep Ekasila yang diberi nama Gotong-royong adalah aspek tradisi yang ditangguhkan pemahamannya (Derida) dan sekarang sudah kontekstual dengan kondisi masyarakat namun harus diinterpretasi karena masih bersifat mitos atau simbol (Ricouer). Selama ini pembangunan berdasarkan UUD 1945 dengan spirit Sila I dari Trisila pemerintah telah membangun fasilitas fisik dalam rangka tata kelola masyarakat Indonesia atas kepercayaannya adanya Tuhan berdasarkan nilai-nilai Sila I Pancasila dengan keberadaan Departemen agama; kemudian dengan spirit Sila II dari Trisila yaitu Sosio Nasionalisme dibentuk tata kelola untuk memfasilitasi terbangunnya jiwa nasionalisme masyarakat berdasarkan nilai-nilai Sila II dan III Pancasila baik keluar dengan menghormati nasionalisme bangsa lain, maupun ke dalam menjadi

bangsa yang berjati diri dan bersatu. Dalam spirit Sila III dari Trisila yaitu Sosio Demokrasi mengadakan tata kelola memfasilitasi terbangunya masyarakat demokratis sebagai usaha mewujudkan nilai-nilai Sila IV Pancasila sebagai demokrasi politik dan nilai-nilai Sila V Pancasila sebagai demokrasi ekonomi. Tahun 2019 kita baru saja menyelenggarakan pemilu pileg dan pilpres untuk ke sekian kalinya dan tahun 2020 direncanakan diadakan pilkada adalah implementasi nilai-nilai Sila IV dari Pancasila sebagai demokrasi politik. Sedangkan nilai-nilai Sila V Pancasila merupakan usaha mewujudkan keadilan sosial sebagai demokrasi ekonomi. Saya setuju dengan pengandaian Yudi Latif dua sila tersebut bak dua sayap garuda di mana Sila IV yaitu demokrasi politik sebagai satu sisi sayap perangkat keras prosedural demokrasi sudah terbangun semakin kokoh dengan keberadaan KPU sementara Sila V demokrasi ekonomi sayap satunya sebagai perangkat lunak budaya demokrasi belum berkembang dengan baik sehingga garuda tidak dapat mengepakkan sayapnya untuk terbang. Namun sudah mulai ada kesadaran dari pimpinan Negara dengan kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di muka terutama dengan keberadaan BPIP.

J. Pancasila: Trisakti dan Revolusi Mental

Dalam hal ini pemikiran Yudi Latif tentang Pancasila sebagai basis transformasi dengan moderasi agama dalam membangun rumah bersama menawarkan cara bagaimana memajukan Pancasila (sebagai obat penyakit perpecahan pen.) apalagi di era pandemik sekarang ini yaitu dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam tiga ranah peradaban yaitu tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera, pembudayaan dimensi ideologi dan menguatkan titik temu dalam kondisi kebhinekaan dengan keutamaan Gotong-royong. (Kompas, 4 April 2019; Kompas 31 Mei 2019; Media Indonesia, 31 Mei 2019; Majalah Gatra edisi lebaran Hijriah 1440). Pada hakekatnya adalah Revolusi Mental bagaimana melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia di ranah karakter atau kepribadian bangsa yang religius. Sebagai antitesa terhadap Revolusi Komunis yang anti agama dan kepercayaan kepada Tuhan, Revolusi Mental tentunya menuju masyarakat yang menganut berbagai agama dan kepercayaan kepada Tuhan dengan “potokol” agama sipil dalam tata kelola yang sistematis.

Dalam kerangka **Trisakti** yang dicanagkan Bung Karno seperti diuraikan di depan sampai dengan Sila IV Pancasila, pembangunan yang dilaksanakan oleh para “satrio piningit” dengan

selalu melibatkan kalangan intelektual dan PT dalam usaha mengimplementasikan nilai-nilai modern Pancasila demi mewujudkan negara yang **berdaulat di bidang politik** dan **berdikari di bidang ekonomi** menghadapi globalisasi kiranya sudah mencapai hasil yang signifikan akan tetapi masih dalam rangka transformasi basis struktural - material. Sedangkan dalam mewujudkan **berkepribadian berdasarkan nilai budaya sendiri** sebagai basis kultural - moral - mental, sasaran revolusi mental presiden Jokowi masih banyak tantangan dan itu semua merupakan tugas utama BPIP.

Proses pembangunan di bawah narasi proyek neoliberal selama ini dan sisa-sisa warisan masa kolonial telah membawa nilai-nilai moral dan etika negatif terhadap pembentukan (pencetakan – Yudi Latif) karakter bangsa dan tidak dipersiapkan dengan serius lembaga filternya sebagai bagian tata kelola dalam rangka melindungi dan mengembangkan tata nilai positif terutama dari tradisi dan agama dalam proses pendidikan. Sedangkan akibat paham liberalisme dan kapitalisme dengan prinsip-prinsip individualisme dan persaingan bebas, adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang menimbulkan masalah pada tata sejahtera yang berdampak pada kerukunan bangsa sehingga Ekasila atau Gotong-royong menjadi kontekstual bagi pembangunan bangsa dan negara saat ini. Yaitu pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan tata sejahtera yang menuntut keadilan dalam implementasi nilai-nilai Sila V. Hal tersebut kiranya sudah dipersiapkan oleh para pendiri bangsa yaitu bentuk hubungan kekeluargaan dan prinsip-prinsip Gotong-royong dalam Pidato 1 Juni yang sangat erat dengan aspek tradisi dan agama.

“Gotong-royong sebagai teladan yang mawujud di dalam tradisi kearifan klasik nusantara adalah jatidiri bangsa Indonesia. Spirit gotong-royong mengandaikan keutamaan yang menyatukan Indonesia sebagai bangsa, yaitu kohesifitas, solidaritas, dan konektivitas antarwarga. Gotong-royong menjadi sumbu bagi terejawantahkannya ‘Trisakti’

Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pelaksanaan demokrasi politik dan seperti halnya proses pembangunan di bidang material lainnya, ternyata pemilu kali ini walaupun sebagai kelembagaan atau tata kelola demokrasi politik sudah bisa dibanggakan, namun juga sarat dengan permasalahan etika dan moral. Kerja nasional tersebut menyibukkan para penegak hukum termasuk KPK dan MK sehingga ada yang menyebut dengan *democrazi*, sehingga dapat dikatakan bahwa pemilu kali ini masih menjadi bagian dari jaman “edan”. Jadi sampai dengan penyelenggaraan pemilu yang lalu pemerintah, berdasar kriteria Yudi Latif, sudah mewujutkan tata nilai dan tata kelola negara modern sebagai badan burung garuda

yang kuat termasuk sayap demokrasi politik sebagai prosedural demokrasi telah paripurna. Sekarang tinggal sayap demokrasi ekonomi sebagai budaya demokrasi belum dipikirkan secara menyeluruh sehingga bangsa Indonesia tak mampu “bermanuver” dan tak berdaya menjadi obyek proyek neoliberal.

Dalam rangka menghadapi proyek neoliberal sudah dibangun tata nilai dan tata kelola dan tata sejahtera berdasarkan cara pandang modernisme dengan cerdas oleh bu Sri Mulyani dan lulusan universitas-universitas negara-negara barat lainnya sebagai penerus pendahulunya para “mafia Berkely” dan “mafia-mafia” lainnya. Pembangunan dengan bantuan dan tentunya dengan narasi demi kepentingan negara-negara berpaham kapitalis-liberal sejak 1967 (alih-alih bantuan dari negara-negara komunis) merupakan pilihan politik dalam rangka Kesaktian Pancasila. Berdasarkan cara pandang fenomenologi itu semua bukan merupakan kesalahan karena tidak ada yang salah dengan paham kapitalisme dan liberalisme. Yang salah adalah dalam menghadapi banjirnya nilai-nilai barat dan nilai-nilai asing lainnya yang “katut” masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia, sebagai obyek proyek neoliberal bangsa kita tidak berdaya terutama dalam aspek moral dan etika sehingga mempengaruhi mental bangsa. Kondisi tersebut tentunya dapat mempengaruhi kedaulatan politik serta kemandirian di bidang ekonomi bangsa Indonesia. Karena selama ini kita tak terasa “terhipnotis” atau tepatnya terhegemoni oleh kepentingan negara-negara maju seperti euphoria demokrasi, konsumerisme, latah terhadap budaya asing dan memandang dengan sebelah mata produk budaya sendiri.

Karena kita belum menyiapkan tata kelola untuk menggali dan menumbuhkan “Bushido”nya bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai kekeluargaan dan prinsip-prinsip Gotong-royong berdasar nilai moral dan etika “tulen” Indonesia sama dapat – sama rasa. Untuk itu dalam rangka memberdayakan bangsa dan negara, ditawarkan suatu analisis konsep Gotong-royong dalam teks Pidato 1 Juni dengan metode hermeneutik fenomenologi (Ricouer) yang telah disinggung di depan dengan horizon penafsir/interpretator (uraian terpisah) yang diusahakan sama dengan “penulis” teks pidato dalam usaha memahami makna konsep gotong-royong yang masih simbolis menjadi operasional terhadap pembentukan karakter bangsa Indonesia dengan konsep-konsep tradisi asli Indonesia a.l.: *gemah ripah lohjinawi, toto tentrem karto raharjo, paceklik, bromocorah, rembug deso, jimpitan, lumbung deso.*

Jadi sekarang dapat dikatakan revolusi kita tinggal selangkah searah dengan revolusi mental yang dicanangkan oleh presiden Jokowi yaitu mewujudkan masyarakat demokratis di

bidang ekonomi sebagai implementasi nilai-nilai Sila V dari Pancasila. Yaitu membangun masyarakat berkeadilan dalam tata nilai khas (tulen) Indonesia (lihat Youtube: “Bung Karno revolusi kita tinggal selangkah”). Konsep yang disebut dalam pidato 1 Juni sebagai etika kebersamaan kekeluargaan dengan prinsip-prinsip moral gotong-royong mengandung nilai-nilai etika dan moral yang berakar dalam agama dan tradisi: “... antara yang kaya dan tidak kaya, antara Islam dan Kristen, antara bukan Indonesia tulen (non pribumi) dan peranakan (pribumi) menjadi bangsa Indonesia”. Untuk itu nilai-nilai atribut dari kepribadian atau karakter bangsa dan negara Indonesia masih harus digali lebih dalam terutama yang berkenaan dengan kehidupan beragama kepercayaan kepada Tuhan. Karena efek pergaulan dengan bangsa-bangsa lain pada masa prakemerdekaan dan dilanjutkan di era kemerdekaan ini terutama sifat imperialistik, unsur-unsur nilai kepribadian bangsa Indonesia tertimbun (bukan tercerabut) oleh nilai-nilai budaya asing terutama budaya barat melalui sistem penjajahan dan kemudian kerjasama pembangunan.

K. Pancasila: Strategi Pembudayaan

Bung Karno dalam memahami dan menjelaskan Pancasila dalam pidatonya, seperti diuraikan di atas, memakai metoda atau pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk itu tulisan ini dengan metoda dan pendekatan yang sama dalam memahami Pancasila terutama dalam rangka mengimplementasikan aspek moral dan etika. Yaitu pertama, konsep moderasi agama Max Weber tentang etika protestan dan spirit (semangat) kapitalisme dan prinsip moral individualis dengan *the survival of the fittest* budaya Eropa barat yang menjiwai *the Declaration of independence* Amerika Serikat. Kedua, sebagai antitesa ideologi liberal kapitalis berhadapan dengan ideologi sosialis komunis, diawali revolusi Bolsevik di Rusia ideologi bangsa-bangsa Eropa timur yang dirumuskan oleh Karl Marx dalam Manifesto Komunisnya yaitu ideologi sosialis komunis dengan prinsip moral kolektivisme sama rasa – sama rata dan etika atheisme. Ketiga, Jepang dengan etika shintoisme dengan spirit bangsa peniru dan prinsip moral Bushido dengan konsep hara kirinya atau sepuku (sekarang mejadi takut) apabila salah dan atau kalah. Keempat, bangsa Yahudi/Israel dengan etika agama Yahudi dan spirit zionismenya dan prinsip moral menganggap diri sebagai bangsa terpilih. Bangsa Indonesia yang diidealkan dalam Pidato 1 Juni adalah masyarakat berideologi Pancasila dengan etika kekeluargaan antar agama dan dengan prinsip moral gotong-royong “sama dapat – sama rasa” seperti disebutkan nyong Ambon Franky Sahilatua dalam lirik lagunya Pancasila Rumah Kita. Pancasila adalah paham baru yang lahir dari

revolusi terhadap sistem yang tidak adil dari paham kolonialisme yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pancasila sebagai ideologi dalam mengimplementasikannya kiranya perlu mengadopsi strategi Lenin ketika mengembangkan atau meradikalkan (Kuntowijoyo) ideologi komunisme di Rusia dan Eropa timur.

Seperti diketahui jaman pencerahan ditandai munculnya individu-individu penentang dan ingin bebas (liberal) dari dogma agama/gereja dalam penalaran tentang dunia sebagai awal berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Gerakan ini kemudian mendapatkan pengaruh positif dari ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan individu mempunyai dan membaca bible/kitab injil sendiri yang semula di monopoli oleh gereja (Vatikan) dan itulah awal berkembangnya paham liberalisme dan prinsip moral individualis di Eropa (Pidato pengukuhan Prof. Henri Subiakto - Unair bidang komunikasi). Kepentingan masyarakat liberal dan individual Eropa mendapat dukungan dari kaum gereja yang menentang dogmatisme yang kemudian disebut Protestan dan gereja protestan inilah yang membangun etika kemudian mendasari semangat (spirit) kapitalisme. Karena penemuan-penemuan hasil berfikir bebas tersebut yang bermanfaat bagi kehidupan manusia harus diproduksi massal dalam proses industri. Proses tersebut perlu modal yang dapat diperoleh dari masyarakat yang mempunyai uang yang difasilitasi gereja protestan (menghalalkan bunga bank) kemudian oleh Marx disebut kaum kapitalis dan paham kapitalisme. Sedangkan dukungan gereja terhadap liberalisme dalam kehidupan politik menghasilkan pemikiran/paham demokrasi. Paham liberalisme dan moral individualis menciptakan prinsip "*survival of the fittest*" siapa yang kuat akan menjadi pemenang baik dibidang politik (demokrasi liberal) maupun ekonomi (kapitalisme liberal) yang menghasilkan kesenjangan. Bidang politik dengan demokrasi liberal menghasilkan lembaga pemilu sedangkan di bidang ekonomi dengan kapitalisme liberal warga negara selain membayar pajak untuk pemerintah juga memberikan sebagian rezekinya ke tempat ibadah *collecte* (persembahan) untuk gereja. Apabila pemerintah dengan pajaknya bertugas membangun infrastruktur di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sedangkan gereja seperti dikatakan Yudi Latif menjadi moderasi bagi umat yang kuat dan (diberiNya) banyak rezeki dan yang lemah yang (diberiNya) sedikit rezeki. Di Eropa salah satu lembaga yang terbentuk adalah tradisi SINTERKLAS yang diselenggarakan gereja untuk umat yang tidak fit secara ekonomis di komunitasnya di perdesaan.

Format masyarakat Eropa seperti itulah sasaran revolusi Bolsevik di Rusia yang mengawali revolusi komunis di Eropa Timur. Revolusi di tingkat pemerintahan mengganti pemerintah kerajaan yang dikuasai oleh kelas kapitalis dengan pemerintah kelas buruh yang dilaksanakan Partai Bolsevik atau Partai Komunis Rusia dari pucuk pimpinan negara hingga ke desa-desa. Karena Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan dan agama (sebagai candu) maka gereja dan tempat ibadah agama lainnya kemudian dijadikan oleh Biro Propaganda Partai Komunis Rusia menjadi “kantor” atau biro propaganda komunisme di desa-desa dengan “kitab sucinya” Marxime Leninisme dan semua proses produksi dikuasai pemerintah dalam mewujudkan masyarakat komune dengan habit sama rasa – sama rata. Pola inilah yang kemudian menjadi model dalam pembentukan Uni Soviet dan kemudian di Negara-negara Eropa Timur lainnya. Kemudian dalam perang dingin terbentuklah China Komunis, Korea Utara, Vietnam, Kamboja, Laos dan untung di Indonesia G 30 S PKI 1965 gagal karena kesaktian Pancasila. Sebagai bagian dari proses revolusi strategi Lenin dalam membumikan komunisme di komune-komune/desa kiranya dapat diadopsi bagaimana membumikan Pancasila di desa-desa di seluruh Indonesia.

L. Pancasila: Membangun Etika Kekeluargaan dan prinsip Gotong-royong di Desa

Dengan inspirasi dari strategi Lenin dalam menginterpretasi atau menafsir konsep sama rasa – sama rata Manifesto Communis dan menanamkan atau meradikalkan ideologi komunisme di komunitas-komunitas diperdesaan (ketika itu tentunya masih menjadi umat gereja) di Uni Soviet, dengan membaca ulang teks Pidato 1 Juni 1945, kiranya kesaktian Pancasila dapat dipertahankan melalui moderasi agama dalam membangun rumah bersama tidak hanya mengembangkan sikap toleransi namun membangun (kembali) perasaan dan sikap empati dengan membentuk tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera yang merujuk pada nilai-nilai tradisi dan agama dan kepercayaan khas (tulen) Indonesia yaitu etika kekeluargaan antar agama dan prinsip moral gotong-royong terutama “antara yang kaya dan tidak kaya” yang diuraikan dalam Pidato 1 Juni. Dengan jalan enyisihkan sebagian dana *collecte* (persembahan) untuk gereja (Kristen), sodaqoh, zakat dll. (Islam), *dane punye* (Hindu Budha), *angpao* (Konghucu) untuk dana bersama dalam memecahkan masalah kesenjangan dan kemiskinan di desa disamping dana dari APBN/APBD melalui pendekatan pendidikan yang idealnya menjadi salah satu tugas BPIP. Adanya dana desa milyaran yang masih dikelola dengan cara/narasi neoliberal sejak jaman Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang sekarang dikomandoi oleh bu Sri Mulyani dengan ilmuwan-ilmuwan PT positifis

lainnya yang memang tidak salah menurut cara pandang fenomenologi, terutama dalam rangka mendapatkan kedaulatan politik dan berdikari dibidang ekonomi. Namun di bidang budaya masyarakat perlu diberdayakan dan diperkuat spiritnya dengan menggali lebih dalam dan menumbuhkan lagi “umbi-umbi” etika dan moral kebersamaan dan unsur-unsur budaya “tulen” lainnya yang berakar di desa-desa yang selama ini tertimbun nilai-nilai budaya asing yang negatif pengaruhnya terhadap mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau di barat yaitu Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dengan etika protestan dan habit moral individualismenya, di Jepang dengan etika Shinto dan habit moral Bushidonya, Israel dengan etika Yahudi dan habit moral zionismenya, ternyata bangsa Indonesia belum berusaha memahami secara serius termasuk secara ilmiah di PT konsep kekeluargaan dan gotong-royong dalam teks Pidato 1 Juni sehingga habit sebagai bangsa terjajah masih kuat.

Makna hidup kebersamaan sebagai bangsa yang dirumuskan dalam Pidato 1 Juni 1945 dengan etika kekeluargaan antar suku dan ras serta prinsip-prinsip moral gotong-royong yang religius (antar agama) harus segera ditumbuhkan secara sistematis untuk mewujudkan habit kebersamaan masyarakat dalam bangsa multi budaya dan agama seperti bangsa Indonesia ini dalam rangka menyempurnakan Trisakti. Menumbuhkan nilai budaya yang mendasari kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia menjadi *social capital* yang kuat menghadapi imperialisme budaya di balik proyek neoliberal. Oleh sebab itu kita perlu membangun moral dan etika kebersamaan antar agama-agama di Indonesia sesuai amanat Pidato 1 Juni di desa-desa di mana agama resmi ada 6 dan ditambah kepercayaan asli dengan pendekatan pendidikan. Untuk itu selain strategi Lenin, kiranya perlu mempelajari bagaimana Deng Qiaoping menghidupkan kembali ajaran konfusianisme di komune-komune China yang terlanjur diberangus oleh revolusi kebudayaan Mao Jedong. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan masyarakat gotong-royong melalui moderasi agama membangun jatidiri yang berkarakter Indonesia “tulen” dengan pendekatan pendidikan melalui metode pendampingan yang egaliter menjadi agama sipil.

M. Pancasila: Pengembangan DNA berjiwa toleransi dan empati

Pemerintah Orde Baru mengembangkan pemikiran tentang Pancasila dan mensosialisasikannya melalui BP7 menurut versi sejarah dan caranya sendiri. Dalam rangka

mendeligitimasi presiden Sukarno karena masih kuatnya pengaruh kharisma Bung Karno sedangkan semangat Orde Baru adalah membuktikan kesaktian Pancasila dengan “melaksanakan secara murni dan konsekuen”, maka sejarahwan Orde Baru menafikan tentang Pidato 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila yang akibatnya masih terasa dalam cara memahami Pancasila hingga sekarang termasuk di PT. Dengan berkembangnya cara pandang fenomenologi dan metode hermeneutik serta paradigma postmodern, Pidato 1 Juni dengan fenomenologi dipahami dasar negara yang dibangun secara intens-eksistensial dalam situasi penjajahan hasil proses *intersubjective* antara *founding fathers* melalui "lidah" Ir. Sukarno sebagai *ego transcendental*. Dalam metode hermeneutik, Pidato 1 Juni adalah teks autentik yang secara aklamasi diterima dan disetujui (disepakati) oleh 68 para *founding fathers* anggota BPUPKI (Habermas). Dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara lebih lanjut teks Pidato merupakan ontologi dasar negara Indonesia, seperti telah diuraikan, mempunyai 3 tiga karakter yaitu Pancasila, Trisila dan Ekasila atau Gotong-royong sebagai oposisi binair. Dua yang pertama adalah aspek modern yang dilakukan pemaknaanya oleh Panitia 9 dan menghasilkan konstitusi sebagai *leitstar dinamis* yang menjadi penuntun pembangunan nasional selama ini sedangkan yang ke tiga yaitu gotong-royong adalah aspek tradisi yang (ter)tunda pemaknaanya (*defferance – Derrida*). Konsep gotong-royong sekarang sangat kontekstual dengan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila adalah titik temu, aspek pemersatu sebagai *meja statis* yang didefinisikan dalam Pidato disebutkan sebagai produk budaya "tulen" Indonesia hingga perlu menemukan definisi operasional yang *compatible* dengan apa yang dimaksud oleh Pidato 1 Juni dari khasanah budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Dalam buku “Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa” disebutkan prioritas utama pembangunan nasional adalah bidang Mental, Agama, Rohani, Kebudayaan dan Penelitian. Salah satu pedoman yang harus dirujuk adalah:

Penetapan Pancasila yang didasarkan pada Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, sebagai mata pelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi, dengan tujuan utama menumbuhkan budaya gotong-royong dan kekeluargaan, sikap-sikap toleran, menghilangkan sikap kosmopolitanisme, individualism, dan feodalisme; serta tangguh dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi di masa depan.

Dengan metode hermeneutik, dalam mengoperasionalkan konsep gotong-royong yang masih simbolis (Ricouer) meminjam cara penggolongan jenis binatang (fauna) atau tumbuh-tumbuhan (flora), gotong-royong kiranya masih merupakan genus dari berbagai "spesies" kepemimpinan dan kebersamaan masyarakat Indonesia praHindu. Oleh sebab itu perlu ditemukan perilaku-perilaku kepemimpinan dan kebersamaan yang pernah dibangun oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang sesuai dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sekarang. Kata kang Yudi binatang simpanse mempunyai DNA 99% dari DNA manusia dan proses modernisasi dunia selama ini DNA manusia berkurang dan hampir mendekati DNA simpase. Oleh sebab itu ibarat cerita tentang usaha menghidupkan kembali binatang purba dalam film *Jurasic Park*, dinosaurus adalah genus dari spesies Tirez, Tiranosaurus, Brontosaurus dan lain-lain spesies yang berbeda wujud dan perilakunya. Dalam poject *Jurasic Park* berbagai spesies dihidupkan kembali dari DNA yang terdapat dalam fosil darah nyamuk yang menggigit masing-masing spesies sehingga ada DNA dinosaurus predator buas pemakan daging dan DNA pemakan tumbuh-tumbuhan menjadi penghuni pulau terpencil tersebut.

Konsep gotong-royong yang didefinisikan dalam Pidato 1 Juni 1945 di bawah naungan filsafat kontemporer yang sifatnya pembelaan terhadap yang tertindas akibat paham liberalism dan kapitalisme, adalah kata dari bahasa Nusantara "tulen" masih merupakan genus bangunan masyarakat jaman dahulu dengan bermacam-macam spesies. Oleh sebab itu harus ditemukan DNA spesies terbaiknya dari khasanah antropologi dan sejarah bangsa yaitu berkarakter kepemimpinan dan kebersamaan yang mampu mengakomodasikan dan mengkonsolidasikan spesies-spesies gotong-royong di masyarakat majemuk Indonesia sehingga dapat membentuk mental positif, *social capital* dan mewujudkan keadilan sosial. DNA gotong-royong yang berjiwa toleransi dan empati yang dapat dikembangkan menjadi pola bangunan masyarakat yang dicita-citakan oleh *founding fathers* di jaman kemerdekaan menjadi bangsa hebat (tidak menjadi masyarakat yang saling memangsa seperti di *Jurasic Park*).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia lama atau prahindu atau praagama, ditemukan 2 jenis "fosil" DNA "tulen" Indonesia dan satu jenis DNA dari luar Indonesia namun menjadi relevan dalam rangka membangun budaya kepemimpinan dan kebersamaan bangsa Indonesia modern. Ketiga DNA satu sama lain dapat disintesisakan menjadi karakter dan jatidiri bangsa Indonesia

sehingga mampu mengantar bangsa dan negara Indonesia sukses dan hebat di era globalisasi. DNA tulen pertama, adalah DNA dalam kepemimpinan yang ada pada khasanah sejarah dan budaya bangsa yang telah digali dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu ajaran tiga pilar kepemimpinan bangsa Indonesia *Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso* dan *tut wuri handayani*. Jiwa kepemimpinan tersebut sudah ada pada nenek moyang dan pendahulu bangsa dari jaman prasejarah, jaman Sriwijaya, Mojopahit, Mataram sesuai dengan jamannya dan oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia ketika berjuang dalam mencapai kemerdekaan serta setelah merdeka mampu menggalang Konferensi Asia Afrika dan gerakan Non Blok.

DNA tulen kedua, adalah DNA dalam kebersamaan gotong-royong antara yang kaya dan tidak kaya. Dari data antropologi dan sejarah bangsa Indonesia pada masa sebelum kedatangan agama-agama di Nusantara. Ternyata nenek moyang kita telah mengembangkan sistem dalam memecahkan masalah krisis ekonomi dan kesenjangan/keadilan sosial dengan nilai-nilai dan norma-norma religius yang berlaku ketika itu. Dalam suasana kehidupan agraris tercipta beberapa konsep yaitu pertama, konsep *paceklik* sebagai padanan krisis ekonomi yang menyebabkan munculnya banyak *bromocorah* (pencuri, begal dll.) sehingga desa-desa yang semula *toto, tentrem, karto raharjo* (tertata, aman tenteram dan berkeadilan sosial) menjadi kacau. Kemudian dilakukan *rembug deso* sebagai padanan musyawarah desa dalam rangka memecahkan masalah yang timbulkan oleh *paceklik*. *Rembug deso* melahirkan konsep *jimpitan* sebagai hasil kesepakatan sikap religius sebagai rasa empati masyarakat desa yang berpunya kepada yang miskin. Dari *jimpitan* kemudian konsep *lumbung deso* sebagai padanan swadaya desa. Kebersamaan dalam rangka memecahkan masalah kesulitan (krisis) ekonomi desa inilah kiranya sesuai dengan konsep “tulen” dari gotong-royong yang dimaksud dalam Pidato 1 Juni 1945. Konsep *jimpitan* kiranya merupakan padanan konsep sodakoh (Islam), persepuluhan/persembahan (Nasrani) *danepunye* (Hindu-Budha) dan *angpao* (Konghucu). Bangsa Indonesia dengan karunia *Sing Murbeng Dumadi* (Tuhan) tanah air yang *gemah-ripah, loh jinawi* (tanah air yang subur dan alam yang kaya) dengan adanya *bromocorah* yang terjadi akibat *prahara paceklik*, karena yang kaya *takabur* dengan kekayaannya menyebabkan yang tidak kaya menjadi *kufur*. Dengan gotong-royong masyarakat dapat diharapkan kembali *syukur* menjadi *toto, tentrem, karto raharjo*.

DNA dari luar, adalah DNA kepemimpinan dan kebersamaan masyarakat multi suku dan agama di kota Madinah yang sangat relevan dengan kehidupan multi kultural masyarakat

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mayoritas masyarakat Madinah didukung kepemimpinan agama-agama lain yang ada di Madinah ketika itu telah membangun masyarakat yang rukun bersatu menghadapi ancaman bersama dari kaum kafir penyembah berhala dengan Piagam Madinah sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* sehingga masyarakat Madinah menjadi *toto, tentrem, karto raharjo* – yang terkenal dengan istilah Masyarakat Madani.

N. Pancasila: Revolusi Mental mewujudkan Masyarakat Madani

Seperti diketahui setelah PD II masih kuatnya pengaruh filsafat klasik dalam hubungan antar bangsa termasuk dalam kegiatan PBB mengenai bantuan pembangunan di negara-negara berkembang proses pembiayaan dan pelaksanaannya selalu terkait dengan fungsi Bank Dunia dan IMF serta WTO. Karena dana yang dipakai adalah “bantuan” dari negara-negara maju (barat) yang berideologi kapitalis liberal bersifat struktural dan oleh sebab itu dalam implementasinya tentunya bukan tanpa tujuan dan persyaratan yaitu memakai preskripsi-preskripsi (narasi) berdasarkan ideologi yang sesuai dengan kepentingan negara-negara maju sebagai negara donor. Salah satu syarat bantuan negara-negara barat untuk Indonesia sebagai negara kreditor sejak Orde Baru adalah perlunya stabilitas politik dan pendekatan kebijakan *top down* dan metode sosialisasi ideologi Pancasila bersifat indoktrinasi dan mobilisasi dan harus merujuk pada preskripsi-preskripsi pembangunan negara-negara donor itulah fungsi BP7. Selain bantuan untuk industrialisasi juga mempunyai bantuan program pembangunan masyarakat desa dan masyarakat terpencil antara lain melalui IDT. IDT juga merupakan bagian dari kebijakan yang bersifat struktural harus mempersiapkan fasilitator-fasilitator pelatih/penatar melalui *TOT (training of trainer)* untuk menguasai prinsip-prinsip liberalisme dan kapitalisme negara-negara donor dengan model *Community Development (CD)* dan *Community Empowerment (CE)* agar masyarakat desa selain lebih cepat menyerap nilai-nilai modern dan western agar terbangun karakter individualis, konsumeris barang-barang industri dan hedonis meninggalkan nilai-nilai budaya sendiri menyusul masyarakat kota yang sudah terlebih dahulu menjadi marjinal terhadap nilai-nilai budayanya sendiri.

Melalui model *CD* dan *CE* inilah dalam pelaksanaan IDT dan kemudian Program Pembangunan Kecamatan (PPK) serta proses pemberdayaan masyarakat miskin akibat krisis

ekonomi ternyata secara tidak langsung terjadi proses penetrasi sistematis penanaman nilai-nilai negative liberalism dan kapitalisme tersebut ke dalam jiwa masyarakat desa untuk kepentingan (keuntungan) negara-negara donor. Proses tersebut, terutama akibat kesenjangan social ekonomi yang terjadi, sedikit banyak memicu gerakan-gerakan radikal dan fundamental. Model *CD* dan *CE* kiranya dapat diadopsi untuk pendidikan dan pembangunan karakter dalam rangka Revolusi Mental bangsa Indonesia. Karakter yang berkearifan lokal, mempunyai identitas dan orientasi ke masa depan, mandiri, dengan kepemimpinan dan moral kebersamaan Gotong-royong antara yang kita yang kaya dan tidak kaya mewujudkan mental positif bangsa dalam menghadapi globalisasi sekaligus **merawatnya**.

Untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan sejarah yang benar dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat madani di Indonesia perlu keberadaan **Komisi** sebagai lembaga pengganti BP7. Dengan keberadaan BPIP kiranya dapat menjalankan fungsi sebagai komisi dan melalui fasilitator-fasilitator pendamping atau komisioner (bukan penatar) memfasilitasi dan mendampingi masyarakat Indonesia model Paulo Friere di desa-desa dalam memahami (menghayati) dan menjadikan perilaku sehari-hari (mengamalkan) karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan. Pendampingan dalam rangka terwujudnya bangunan masyarakat religious “sama dapat - sama rasa” sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang bermental positif. Dengan mencabut sampai akar-akarnya pengaruh nilai-nilai asing dan membangun kehidupan kolektif ala Indonesia sebagai proses **Revolusi Mental** dari bermental negatif menjadi bermental positif melalui pendekatan kebijakan sebaliknya yaitu *bottom up* dan metode sosialisasi pendidikan partisipatif (*participative education*) dengan mempersiapkan fasilitator-fasilitator pendamping melalui *TOF* (*training of fasilitator*) yang menguasai prinsip-prinsip Gotong-royong dengan model *CD* serta *CE* membentuk “keikaan” di tengah “kebhinekaan” yang betul-betul aktual.

Pendampingan yang mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari jaman *edan* jaman *kolobendu* dan menyongsong jaman kejayaan jaman *Kolomukti* datangnya Ratu Adil. Menurut HOS Tjokroaminoto Ratu Adil dapat merupakan “Sistem pemerintahan yang dijalankan yang mampu mengejawantahkan jiwa dan kemajuan politik dan ekonomi yang diangankan setiap orang” sebagai Heru Cakra. Hal tersebut tanggal selangkah lagi dan dengan merealisasikan jiwa kekeluargaan dan spirit gotong-royong sebagai aspek tradisi, sesuai dengan amanat Pidato 1 Juni menjadi bagian dari perjuangan merealisasikan nilai-nilai Pancasila, maka modal sosial yang

terbangun akan melengkapi Trisakti yang selama ini kita baru memfokuskan diri pada pembangunan aspek modern sebagai sebuah negara bangsa. Apabila pembangunan dalam rangka berdaulat di bidang politik dan berdikari di bidang ekonomi selama ini merupakan perjuangan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dan Trisila sebagai *golden rule* aspek modern bangunan fisik negara yang sudah sampai pada tahap paripurna (Yudi Latif), maka perilaku kekeluargaan dan gotong-royong yang terbangun dari norma-norma moral dan etika yang berakar dalam budaya bangsa adalah *golden rule* aspek tradisi kepribadian bangsa. Apabila masyarakat gotong-royong dengan etika kerukunan dan kekeluargaan antar umat beragama terbangun maka Indonesia akan menjadi negara hebat, lebih hebat dari masyarakat individualis barat yang beranggapan bahwa dunia adalah tanggung jawab bangsa kulit putih (*white man burden*) dengan etika Protestannya atau bangsa Jepang yang mempercayai mitos bahwa mereka adalah putra dewa dengan spirit Hoko Ichi U dengan etika samurai bushido -Tenno Shogo Seishinnya atau Cina yang dengan ideologi komunisme dengan etika konfusianismenya yang mempercayai bahwa mereka adalah pusat dunia atau bangsa Israel yang percaya bahwa mereka adalah bangsa terpilih (oleh Tuhan) dengan spirit Zionismenya. Karakter gotong-royong adalah tidak bertujuan mengalahkan atau menguasai dan menjarah siapa-siapa karena bangsa Indonesia cinta damai dan sudah kaya raya dikaruniai Tuhan tanah air bak jamrud di katulistiwa. Spirit dan kepribadian Pancasila dengan pengalamannya sebagai bangsa terjajah adalah bertujuan mulia ikut menciptakan ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial.

O. Kota Ambon dan Pendidikan Tinggi (PT) sebagai *pylot project*

O.1. Ambon *Manise*

Dari sekian banyak konflik SARA yang terjadi di Indonesia sebagai imbas reformasi kiranya konflik saudara-saudara kita di Ambon dan Maluku akibat kesalahan tata kelola akan tata nilai dan tata sejahtera dalam keberbedaan SARA dapat menjadi *pylot project* implementasi pemikiran yang sudah diuraikan. Tanah Ambon memang nun jauh di belahan timur Indonesia yaitu ibukota Propinsi Maluku propinsi maritim dengan hasil lautnya dan rempah-rempah (*white gold*) yang melimpah dengan semboyan kebersamaan *Katong Samua Orang Basudara* dan *Pela Gandongnya*. Peristiwa Ambon yang sangat mencederai HAM tersebut menginspirasi seniman musik Franky Sahilatua (alm.) sebagai nyong Ambon namun juga arek Surabaya. Franky kemudian menciptakan lagu secara *intens* dan penuh harapan tentang Pancasila dengan judul

“**Pancasila Rumah Bangsa Indonesia**” Lagu yang diciptakan oleh *nyong* Ambon dan sekaligus *arek* Surabaya tersebut tentunya bukan tanpa tujuan. Pengalaman traumatik konflik berdarah-darah antar saudara di tanah leluhurnya telah menyentuh hati nuraninya sebagai seniman. Menurutnya Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* seharusnya menjadi rumah dan tempat beribadah bersama dalam agama sipil demi persatuan bangsa Indonesia.

Mungkinkah tembang *nyong Ambon* tersebut dapat terwujud?. Tergantung pada daya ingatan (*eling*) kita pada sejarah dan kewaspadaan (*waspodo*) kita terhadap nilai-nilai asing yang telah atau akan merasuki jiwa bangsa Indonesia. Seperti syair lagu “Pancasila Rumah Bangsa Indonesia” sosialisasi nilai-nilai Pancasila berarti juga usaha membangun atau mewujudkan masyarakat religius **sama dapat sama rasa** sebagai usaha menyempurnakan "sistem pemerintahan yang dijalankan mampu mengejawantahkan jiwa dan kemajuan politik dan ekonomi yang diangankan setiap orang" dengan memuji namaNya, mencintai sesama, menumbuhkan rasa bersatu sebagai suatu bangsa, saling bersambung rasa dan saling membagi rejeki. Membangun karakter masyarakat saling percaya (*trust*) dan rasa empati atau *tepa selira* demi terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di masyarakat untuk saling tolong menolong dan bekerja sama mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada Kongres Pancasila VI diselenggarakan di Unpatti 31 Mei-1Juni 2014 terasa harapan masyarakat Ambon khususnya dan Maluku umumnya agar konflik Ambon 1999 tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dari kongres diharapkan pada Kongres Pancasila VI diselenggarakan di Unpatti 31 Mei-1Juni 2014 terasa harapan masyarakat Ambon khususnya dan Maluku umumnya agar dapat ditemukan cara bagaimana peristiwa saling bantai antar saudara hanya karena perbedaan agama tersebut tidak terjadi lagi selamanya.

Bangsa Indonesia memang belum tuntas dalam menghadapi masalah kebersamaan dalam kondisi plural-multikultural atau membangun kesatuan dan persatuan bangsa mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika* sekaligus menanamkan semangat nasionalis serta sikap dan perilaku patriotis dalam menghadapi globalisasi. Membangun rumah bersama untuk satu keluarga dengan mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam makalahnya di Kongres Pancasila VI 1 Juni 2014 di Unpatti mantan gubernur Maluku 2 periode 2003-2013 Karel Alberth Ralahu mengatakan:

“*Katong Samua Orang Basaudara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ... kedua ciri utama ke-Malukuan-an itu telah menjadi sebuah acuan khusus dalam membangun visi dan misi pembangunan Maluku guna mengantarkan Maluku mengakhiri konflik dan membangun perdamaian sejati di bumi Maluku*”.

Pada kesempatan yang sama untuk melanjutkan apa yang telah direncanakan dan dimulai oleh gubernur pendahulunya tersebut Said Assegaff sebagai gubernur baru menegaskan akan menjadikan propinsi Maluku sebagai **Laboratorium Perdamaian**. Untuk itu kota Ambon yang paling menderita dalam konflik 1999 kiranya dapat menjadi *pylot project* pembangunan rasa empati masyarakat Pancasila dalam kegotong-royongan khas Indonesia.

1. Kemiskinan adalah salah satu sebab terjadinya keresahan, ketidak amanan, ketidak rukunan di masyarakat.
2. Dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan bersama akibat krisis ekonomi (*paceklik*), kota Ambon khususnya dan kepulauan Maluku pada umumnya yang *gemah ripah lohjinawi* dengan rempah-rempah dan hasil lautnya menjadi *pylot project* pembangunan karakter nasional.
3. Walikota Ambon membicarakan bersama dan mendapat persetujuan dari pemuka-pemuka agama yang ada (*rembug desa*) sebagai proses moderasi untuk menemukan cara bagaimana umatnya menyisihkan sebagian dana umat (*sodakoh/sedekah Islam, collecte/persembahan Kristen/Katolik, dane punye Hindu/Budha, angpao Konghuchu*) masing-masing (*jimpitan*) menjadi dana bersama (*lumbung deso*) untuk dibagikan oleh “sinterklas” desa masing-masing kepada yang berhak. Yaitu masyarakat miskin yang gagal dalam persaingan perebutan rezeki di dunia yang dikuasai paham neoliberal.
4. Setelah terjadi kesepakatan, walikota mengawali dan memelopori (*ing ngarso sung tulodo*) menyerahkan dengan ikhlas dan terbuka/jujur *sodakoh* dari gaji dan pendapatan lainnya, sebagian ke agamanya dan sebagian ke dana bersama di desa (KTP-Elektronik) dengan membuka rekening sendiri.
5. Walikota dengan Perwali menghimbau semua pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan rekanan pemerintah mengikuti langkahnya di desa masing-masing (*ing madyo mangun*

karso) dengan harapan diikuti oleh penduduk desa (*tut wuri handayani*). Untuk itu disediakan sertifikat bagi yang melaksanakan untuk keperluan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri, mengikuti tender bagi pengusaha dan perusahaan rekanan, syarat mengikuti pemilu/politisi dan pelayanan bagi penduduk biasa.

6. Program dengan pendampingan harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah dalam mengembangkan perdesaan. Program sebagai proses pembangunan/pencetakan karakter masyarakat gotong-royong Pancasila dimana tidak ada lagi anak-anak terlantar, orang tua yang tak terurus serta potensi TKI yang merendahkan martabat bangsa serta memaksimalkan potensi produktif desa yang insyaallah dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota Indonesia.
7. Walikota mengajak perguruan tinggi untuk merumuskan pelaksanaannya lebih lanjut terutama dalam pembentukan tata kelola atau kepengurusan agar berjalan efektif dan efisien karena tentunya perlu pendamping-pendamping yang handal yang dikembangkan di PT dengan tridharmanya dalam membangun kecerdasan kolektif dan moral publik. Adapun “kitab sucinya” adalah Teks Pidato 1 Juni 1945, UUD 1945 dan amandemennya, buku-buku dan tulisan-tulisan serta ceramah kang Yudi dan teman-teman pejuang Pancasila lainnya yang sudah di syahkan atau direkomendasi oleh BPIP dan lembaga lain yang mempunyai otoritas dan kompeten. Dalam hal ini saya mengusulkan berbentuk komisi seperti KPK, KPU misalnya Komisi Pembangunan Karakter Bangsa (KPKB) dalam mewujudkan habit sama dapat – sama rasa dan melaksanakan “kesinterklasan” Indonesia.

P. Pendidikan Tinggi (PT) sebagai *pylot project*

Seperti diketahui dunia pendidikan dimanja oleh berbagai program termasuk 20% APBN dan APBD, sertifikasi untuk guru dan dosen dll. UU 12/2012 tentang PT pasal 35 mewajibkan Pendidikan Pancasila di PT. Dari proses “pemanjaan” ternyata juga terjadi kesenjangan walaupun tidak mengakibatkan kelaparan. Namun sebagai pribadi yang tidak hanya harus **digugu** tetapi juga **ditiru** terutama dalam *how to live together* dengan karakter peduli belum terbangun habit yang patut ditiru. Selama ini hanya ditonjolkan kepinteranya dalam keilmunya masing-masing dengan segala kepribadian yang mendukung menjadi pintar. Sementara di bidang rezeki justru berkembang prinsip individualisme, pragmatisme, *the survival of the fittest* namun dengan habit konsumeris - hedonis. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kehidupan kebersamaan gotong-royong

penuh rasa empati dengan habit kepedulian kepada yang tidak beruntung untuk kemudian dapat ditiru mahasiswa. Dengan adanya UU 12/2012 sepatutnya PT menjadi contoh dalam mengembangkan perilaku Pancasila para pendidik yang patut ditiru oleh anak didik.

1. Universitas ibarat kabupaten/kota maka Rektor adalah bupati atau walikotanya, dekan adalah Camat sedangkan departemen atau jurusan adalah desanya.
2. Kesenjangan pendapatan yang terjadi antara dosen dengan tenaga non edukatif, antar dosen sendiri seperti dari penelitian, HAKI, mengajar, dokter, pengacara, farmasi, akuntansi dan sertifikasi layak dibangun kegotong-royongan Pancasila.
3. Rektor dengan segala jenis pendapatannya dan disusul oleh pejabat-pejabat dan dosen biasa menyetorkan sebagian atau “jimpitan” sodakoh untuk agamanya ke jurusan masing-masing demikian pula pegawai lainnya. Dari proses jimpitan diterbitkan sertifikat untuk keperluan kenaikan pangkat dan jabatan.
4. Dibentuk kepengurusan yang mengelola dana bersama tersebut dalam rangka ikut menghadapi krisis yang dihadapi baik individual maupun kolektif baik antar sivitas akademika maupun dengan masyarakat luar kampus (baksos) sehingga terbangun kebersamaan yang tulus kegotong-royongan Pancasila.
5. Kepengurusan bersama di PT bersama MKWU sebagai institusi pengembangan karakter mahasiswa juga mengembangkan model gotong-royong Pancasila antar mahasiswa dan tentunya tidak saling memberi rezeki tetapi saling memberi pengetahuan dalam proses belajar mengajar. Dengan *menggugu* apa yang diajarkan dan *meniru* apa yang dicontohkan dalam perilaku kedisiplinan sekaligus kebersamaan para dosen/guru mereka dalam mengembangkan ilmu di lembaga pendidikan masing-masing sebagai proses pembentukan atau pencetakan karakter mahasiswa.
6. Pemahaman/penghayatan dan pengamalan perilaku gotong-royong Pancasila oleh mahasiswa hasil proses pendidikan di MKWU adalah sebagai kegiatan KPKB di kampus dengan penerbitan sertifikat pendamping ijazah. Dengan proses ini dapat diharapkan kampus-kampus dapat menghasilkan pendamping-pendamping masyarakat yang handal baik melalui KKN maupun pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan atau pencetakan karakter bangsa.
7. Pembangunan masyarakat gotong-royong di kampus idealnya terintegrasi dengan program BPIP dan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.

P. METODOLOGI: Pendidikan Pancasila Partisipatif (P3) sebagai "Pesantren Agama Sipil"

Pendidikan Pancasila sebagai pemberdayaan dan pembudayaan dengan lokasi di wilayah desa diperlukan regulasi yang demokratis dan partisipatoris di daerah dan masyarakat yang termajinalisasi selama pemerintahan yang lalu yang sentralistik dan otoriter. Lebih operasional lagi adalah kegiatan melakukan fasilitasi atau pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat *grass root*/akar rumput yang marjinal tentang ideologi Pancasila yang dinamakan Pendidikan Pancasila Partisipatif (P3).

Dari uraian di depan, selama reformasi masyarakat Indonesia sudah termajinalisasikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu sebagai langkah awal pendidikan alternatif P3 harus terus dikembangkan sesuai dengan realitas dan praktek-praktek pendidikan partisipatif di lapangan menuju masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang dikonsepsikan sebagai perilaku Gotong-royong yang religius atau perilaku Agama Sipil Indonesia. P3 dipahami sebagai wahana masyarakat *grass root* untuk proses transformasi dari dalam dan oleh masyarakat *grass root* sendiri ke arah kehidupan kebersamaan yang Pancasilais tahan terhadap AGHT sebagai proses pendidikan "pesantren" Pancasila.

P3 pada hakikatnya juga proses pendampingan terhadap masyarakat *grass root* yang dilakukan melalui proses usaha pembangunan yang memberdayakan. Proses pendidikan demikian dipahami dalam arti proses belajar bersama dengan menggunakan metode yang partisipatif dalam merumuskan hidup kebersamaan mereka. Dalam menyelenggarakan proses pendidikan itu, maka pendidikan tersebut harus dibangun berdasarkan nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat sendiri (Paulo Friere).

Berdasarkan berbagai pengalaman dalam melakukan pendampingan terhadap kaum marjinal, ternyata metode pendidikan yang partisipatif tersebut telah ada di dalam kehidupan komunitas asli kita sendiri, yaitu musyawarah. Musyawarah (*dialogue of life*) dan karya bersama (gotong-royong) adalah nilai-nilai manusiawi yang sudah ada dan berakar pada komunitas sendiri; terutama di pedesaan. Musyawarah itu sendiri merupakan akar dan tradisi dari kehidupan demokrasi di masyarakat.

Ditinjau dari kebutuhan kaum marjinal, maka pendidikan dengan metode musyawarah sebenarnya adalah sebuah model pendidikan alternatif. Dari segi metodenya adalah sebuah model

pendidikan partisipatif. Musyawarah, dialog rakyat atau dialog kehidupan (*dialogue of life*) merupakan ruh atau nyawa dari seluruh proses belajar bersama.

Ditinjau dari tujuan musyawarah dalam P3 adalah proses penyadaran bersama. Bila dilihat dari kondisi masyarakat *grass root* sebagai kaum marjinal yang serba kekurangan pengetahuan tentang ideologi nasional Pancasila dan terbatas serta posisinya yang terbelenggu oleh ajaran-ajaran lama dan bahkan ajaran-ajaran asing dari luar negeri baik langsung maupun melalui para protagonisnya di dalam negeri yang bertentangan dengan asas kehidupan bersama sebagai bangsa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, maka proses musyawarah dalam P3 sebenarnya merupakan pendidikan yang membebaskan. Dengan demikian musyawarah dalam P3 pada hakekatnya adalah pendidikan demokrasi, pendidikan pembangunan transformatif, pendidikan politik rakyat, dan pendidikan yang membebaskan dari pengaruh nilai-nilai asing.

Misi utama P3 adalah penguatan komunitas (kaum marjina), yang meliputi penguatan kesadaran transformatif, penguatan organisasi, penguatan jaringan kerjasama, penguatan ekonomi dan penguatan advokasi. Misi tersebut satu sama lainnya merupakan kesatuan yang saling berkaitan.

P3 akan disempurnakan dari waktu ke waktu melalui pengkayaan dengan pengalaman praktek, masukan dari fasilitator dan masyarakat dan bahan-bahan perbandingan dari pengalaman lembaga-lembaga lain melalui bahan-bahan bacaan.

P.1. Pengertian P3 sebagai Model Pendidikan Menjadi Manusia Indonesia

Apabila Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia diyakini oleh para *founding fathers* merupakan ideologi besar dunia dapat menjadi pedoman hidup manusia di seluruh dunia, maka P3 dapat diselenggarakan tidak hanya pada manusia Indonesia. Namun karena Pancasila digali di bumi Indonesia maka pemahaman dasar tentang hakekat manusia Indonesia menjadi penting dalam memahami hakekat P3 sebelum menjadi bagian dari bangsa-bangsa lain di mana bangsa Indonesia harus menjadi teladan.

Manusia Indonesia dan manusia-manusia yang tergabung dalam ikatan kebangsaan di negara-negara lain di seluruh dunia pada hakekatnya adalah hasil karya yang paling sempurna dari Sang Pencipta. Karena kesempurnaannya itu, manusia dipercaya dan diberi tugas menjadi pengelola alam semesta atau sebagai subyek pembaharuan. Realitas yang sama, dalam hal ini hubungan sebagai sesama anggota suatu bangsa dan hubungannya dengan bangsa lain, mempertemukan manusia untuk melakukan musyawarah.

Musyawarah tentang kesadaran bersama manusia akan realitas merupakan inti terjadinya pembaharuan. Dan manusia selain sebagai anggota kelompok atau makhluk sosial adalah juga makhluk yang ditugasi sang pencipta untuk melestarikan alam semesta ini demi kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian manusia Indonesia adalah makhluk yang mempunyai jatidiri sebagai pribadi dan sebagai anggota suatu bangsa (identitas) dalam pergaulan antar bangsa di planet bumi.

Jadi P3 merupakan proses penyadaran manusia Indonesia sebagai anggota komunitas dari yang paling mikro yaitu keluarga, suku, pemeluk suatu agama hingga sebagai bagian dari makro kosmos yaitu sebagai anggota suatu bangsa dan makhluk di planet bumi dari alam semesta.

P. 2. Pemahaman Dasar tentang Musyawarah dalam P3

Hakekat dasar dari musyawarah adalah: media pengambilan keputusan; sebuah metodologi dan alat; perwujudan kedaulatan dan potensi masyarakat; salah satu dasar negara; peserta musyawarah setara; materi musyawarah ditentukan bersama; dan realitas sebagai obyek musyawarah.

Pendidikan pada hakekatnya adalah proses yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan umur; alam semesta dan pengalaman merupakan guru; sumber belajar dicari dan disepakati bersama; peserta pendidikan dari golongan yang homogen; dan materi pendidikan berdasarkan kebutuhan.

P. 3. Hakekat Dasar P3

Hakekat dasar dari P3 adalah:

- 1) Meletakkan manusia sebagai subyek pendidikan Pancasila.
- 2) Meletakkan realitas sebagai obyek pendidikan Pancasila.
- 3) Tidak tergantung pada waktu dan tempat.
- 4) Berpihak pada kaum marjinal.
- 5) Mempermasalahkan masalah atau hadap masalah (*Problem Possing*).
- 6) Dialogis.
- 7) Materi dan obyek pendidikan berdasarkan kebutuhan dan realitas.
- 8) Apa yang ada di alam sekitar merupakan sumber belajar.

P. 4. Visi, Misi dan Prinsip-prinsip P3

Visi atau wawasan dari P3 adalah terwujudnya kehidupan komunitas yang Pancasila. **Misi** dari P3 adalah mewujudkan kehidupan komunitas yang Pancasila dengan fokus membangun kegotong-royongan masyarakat Indonesia.

P.5. Prinsip-Prinsip Dasar P3.

- 1) Semua kegiatan harus bertitik tolak dari realitas komunitas yang ada.
- 2) Pendidikan harus berhasil membebaskan komunitas dari situasi keterbatasan, ketertutupan, dogmatisme dan menciptakan saling terbuka untuk dialog.
- 3) Semua proses harus bersifat dialogis (hubungan antara subyek-subyek yang setara dan saling terbuka untuk dialog).
- 4) Kegiatan pendidikan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena proses pendidikan berjalan sepanjang umur/seumur hidup. Kegiatan pendidikan pada dasarnya bisa dilakukan dimana saja (tidak harus didalam kelas atau didalam ruangan).
- 5) Dalam pendidikan ini tidak ada guru dan tidak ada murid.
- 6) Pelaksanaan Pendampingan di dunia pendidikan dan masyarakat.

Q. Penutup

Dalam kondisi krisis ekonomi nasional bahkan global dampak pandemik corona 19, desa adalah wilayah administrasi terkecil tempat tinggal setiap warga negara Indonesia yang terdiri dari anggota berbagai komunitas baik yang kaya maupun yang tidak kaya, berbeda agama, suku dan ras (di Amerika Serikat/barat community agama Kristen, China komunis komune Confusianisme, Jepang mura Shintoisme). Dengan berbagai profesi seperti petani, nelayan, pegawai negeri/swasta, pejabat pemerintah, pemilik perusahaan dan lain-lain profesi dan tentunya ada yang umur produktif tapi masih menganggur (*unemployment*), anak tidak sekolah karena tidak ada biaya, dan tidak ketinggalan para manula dengan KTP masing-masing. Jiwa gotong-royong yang lebih dinamis dari kekeluargaan amanat Pidato 1 Juni idealnya dibangun dalam hubungan antar warga desa dan komunitas pendidikan dengan mengembangkan sikap empati antara kita yang kaya dan tidak kaya. Jadi apa yang dilakukan walikota Ambon atau rektor PT adalah suatu model kebersamaan religius hasil kesepakatan (*rembug*) antar agama untuk keperluan kehidupan kebersamaan di desa. Kebersamaan sebagai hasil *rembug desa* dalam mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila diperdesaan dengan semangat welas asih sebagai agama sipil (Yudi Latif), niscaya dapat memberdayakan desa menjadi “bumper” dalam menghadapi krisis ekonomi nasional dan global saat ini.

Penduduk desa sebagai umat beragama menunjukkan jiwa pancasilais dengan ikhlas membayarkan sebagian *sodaqoh, colecte, dane punye, angpao* adalah perintah Tuhan (Sila I Pancasila). Penyisihkan sebagian dana umat masing-masing agama merupakan proses *jimpitan* sebagai wujud kepedulian masyarakat berswadaya dalam rangka memecahkan masalah kemanusiaan bersama di desa (Sila II). Terutama masalah kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan yang menyebabkan idiot kolektif dengan perilaku-perilaku menyimpang dengan munculnya *bromocorah*. Dari sana terbentuk “tanah subur” dalam menumbuhkan rasa bersatu antara yang kaya dengan tidak kaya (Sila III) karena dengan pendampingan masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan berdialog dari hati ke hati (Sila IV) dan pada gilirannya terwujudlah keadilan sosial (Sila V). Sebagai tahap pembangunan gotong-royong di desa sebagai perwujudan Demokrasi Ekonomi idealnya dikelola oleh organisasi independen yang berfungsi pendampingan yang dibentuk (dibiayai/dihonori) oleh pemerintah berkoordinasi dengan BPIP dalam program *transformative* dengan metode P3.

Selama ini masih belangsung pemberian “sodakoh” hanya untuk keperluan kehidupan agama masing-masing menyebabkan hubungan antar umat beragama masih bersifat eksklusif dan pada gilirannya menimbulkan segregasi sosial dan intoleransi yang berkorelasi negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu di tingkat nasional ada rencana pengorganisasian zakat hanya untuk umat Islam dan dana sejenis untuk masing-masing agama. Pembangunan karakter idealnya bukan dengan politik ketakutan (pendekatan keamanan) namun dengan politik harapan melalui “kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal. Pesan Bung Karno dalam youtube: “bung karno revolusi kita tinggal selangkah” menit 12.18-12.44 “membangun masyarakat gotong-royong” dan menit 17.28-19.30 “membangun jiwa bangsa”. Sehingga dengan agama sipil Pancasila pembangunan negara yang sudah paripurna sekarang ini dapat diharapkan menjadi sempurna karena bangsa Indonesia menjadi bahagia bersama dan pada gilirannya dapat ditularkan ke seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjibolosoo, Senyo, 2006 *Developing Civil Society Social Order and the Human Factor*, Ashgate Publishing Company, Suite 420, 101 Cherry Street, Burlington, VT 05401-4405, USA.
- Alfian, 1984, *Ideologi Idealisme dan Integrasi Nasional*. Dalam : Muhaimin, Yahya, & Mac MacAndrews, Colin (eds.), *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Binder, Leonard at al., 1971. *Crises and Sequences in Political Development. Committee on Comparative Politics on the Social Science Research Council*. Princeton : Princeton University Press.
- Binder, Leonard, 1974. *Ideologi dan Pembangunan Politik*. Weiner, Myron, (ed.), *Modernisasi Modernisasi, Dinamika dan Per-tumbuhan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Budiardjo, Miriam, Pudjiastuti, Tri Nuke, 1996. *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Candine, David (2013) *The Undivided Past: Humanity Beyond Our Differences*, Afred A. Knopf, New York.
- Depdagri, Buku Serial Kebangsan I, 2017, Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 Lahirnya Pancasila.
- Edkins, Yenny, Williamms, Nick Vaugan (eds.), 2009, *Critical, Theories and International Relation*, Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN.
- Fukuyama, Francis, 1999, *Social Capital and Civil Society*, The In-stitute of Public Policy, George Mason University.
- Fukuyama, Francis, 1999. *Second Thoughts*, The National Interest, Summer.
- Hardiman, F. Budi, 2015, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P., 2007, *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, CV. Triarga Utama, Jakarta.
- Jenny, Edkins, Vaugan Williamms, Nick (eds.), 2013, *Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kaelan, MS., Dr., 2004, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, Prof. Dr., MS., 2013, *Pembahasan Filsafat Bahasa*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Ito Prajna-Nugroho, 2013, *Fenomenologi Politik, Membongkar Menyelami Manusia*, Sanggar Pembasisan Pancasila, Purworejo.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Nasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama (GPU), Jakarta.
- Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan.

- Latif, Yudi, 2018, *Wawasan Pancasila: Bitang Penuntuh Untuk Pembudayaan*, Jakarta: Mizan.
- Latif, Yudi, Kompas, 4 April 2019, “Miskonsepsi Ideologi”.
- Latif, Yudi, Kompas, Kamis 16 Mei 2019, “Keluar Dari Kemelut”.
- Latif, Yudi, 2019, “Moderasi Kaidah Agama”, Gatra Edisi Lebaran.
- Latif, Yudi, Kompas, 26, Juni, 2019, “Kebangsaan Berperadaban”.
- Latif, Yudi, 2019, *Peta Jalan Transformasi Tata Kelola Negara Indonesia*. Makalah.
- Latif, Yudi, 2020, *Wawasan Pancasila: Bitang Penuntuh Untuk Pembudayaan*, Edisi Komprehensif. Jakarta: Mizan.
- Lubis, Akhyar Yusuf, 2016, *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme*, PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok.
- Manfred B. Steger, 2002, *Globalism, The New Market Ideology*, Rowan & Littlefield Publishers, Inc., USA.
- Morgenthau, Hans J., 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York : Alfred A. Knopf, hal. 150.
- Muhaimin, Yahya, Mac Andrews, Colin, 1984. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ristekdikti, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Plano, Jack C., Olton, Roy, 1968. *The International Relations Dictionary*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Poespowardojo, T.M. Soerjanto, Seran, Alexander, (2016), *Diskursus Teori-teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Riyanto, Armada, tth., *Empati Dalam Penelitian Sosial: Catatan Metodologis-Fenomenologis*, Materi Kuliah S3 Universitas Airlangga, STF Widya Sasana, Malang.
- Ricouer, Paul, 2014, *Teori Interpretasi: Membelah Makna dalam Anatomi Teks*, Penerbit IRCiSoD, Yogyakarta.
- Ristekdikti, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Samekto, FX. Adji, Sabri, Muhammad, Sinaga, Martin Lukito, Salahudin, Asep, 2019, Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa, BPIP.
- Steger, Morgenthau, Hans J., 1978, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Manfred B., 2005, *Globalisasi: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl.
- Suseno, Franz Magnis, (2016), *Pemikiran Karl Marx*, Gramedia, Jakarta.
- Suyanto, Bagong, at al., (2010), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media, Malang.
- Tabb, William K., 2001, *The Amoral Elephant: Globalization and the Struggle for Social Justice in the Twenty-first Century*, Monthly Review Press, New York.
- Tower Sargent, Liman, 1986, *Ideologi Politik Kontemporer*, Bina Aksara, Jakarta.
- Triharso, Ajar, Drs. MS, 2011, *Keunikan Bangsa Jepang: Jatidiri Yang Act Locally and Think Globally Dalam: Persaingan Internasional dan Konsep Keiretsu*. Surabaya: CSGS Publisher.
- Triharso, Ajar, Drs. MS, 2012. *Bisnis Internasional Untuk UKM*, Surabaya: CSGS Publisher.
- Triharso, Ajar, Drs. MS, 2012, *Dewan Perwakilan Daerah sebagai “Senat” di MPR*. Surabaya: CSGS Publisher.
- Triharso, Ajar, Drs. MS, 2015, *Pendidikan Tinggi dan Intelektualisme: Revitalisasi Ideologi dan Menumbuhkan Modal Sosial Bangsa Menghadapi Persaingan Internasional dan Globalisasi*, Madani, Malang.
- Widodo, Joko, “Revolusi Mental”, Kompas, 10 Mei 2014.
- Wolf, Martin, 2004, *Why Globalization Works*, Felicity Bryan Literary Agency 2a North Parade, Banbury Road, Oxford, OX 2 6LX, United Kingdom through Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.
- Yusuf Lubis, Akhyar, 2016, *Postmodernisme: Teori dan Metode*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta